

EKSTREMISME KEKERASAN DI BIMA, NUSA TENGGARA BARAT: LINGKUNGAN RADIKAL DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

Ringkasan Eksekutif	2
I. Pendahuluan.....	3
II. Ekstremisme Kekerasan di Bima	6
1. “Peta” Besar Ekstremisme: Aksi, Aktor, dan Jaringan.....	7
2. Peta Ideologi Radikal di Bima.....	9
3. Sebab-sebab Dukungan dan Keterlibatan: Pandangan Elite Bima.....	12
4. Akar-akar Ekstremisme Kekerasan dalam Sejarah Bima.....	17
III. Lingkungan Radikal: Kampung, “Mujahidat”, dan Dinamika antar-Kelompok ...	19
1. Kelurahan Penatoi sebagai Kantong Radikal	20
2. Contoh Kasus: Penolakan atas Pemilu di Kantong Penatoi	23
3. Sedikit tentang “Mujahidat”: Perempuan di Lingkungan Radikal	25
4. Dinamika Lingkungan Radikal.....	28
IV. Langkah-langkah Binadamai	33
1. Peningkatan Pengawasan di Sektor Keamanan	33
2. Bantuan Ekonomi dalam rangka Reintegrasi	35
3. Membangun Jembatan: Langkah-langkah FKUB Kota Bima.....	37
4. Fenomena Unik Abu Asad dan Umi Aisyah.....	38
5. Kabar Baik dari Kelurahan Penatoi?	40
V. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi	41
Bibliografi	46
Apendiks I.....	48
Apendiks II.....	49

EKSTREMISME KEKERASAN DI BIMA, NUSA TENGGARA BARAT: LINGKUNGAN RADIKAL DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Bima, Nusa Tenggara Barat, sering muncul dalam berbagai laporan tentang peristiwa ekstremisme kekerasan di Indonesia sepanjang dua dekade terakhir. Meskipun insiden kekerasan teroris yang besar tidak pernah terjadi di wilayah itu, nama Bima sering disebut sebagai sumber rekrutmen para pendukung kekerasan ekstremis atau tempat persembunyian para pemimpin kelompok ekstremis yang diburu polisi. Bima juga sering dikaitkan dengan Poso dan Solo sebagai titik segitiga penting dalam perkembangan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Laporan ini ingin menjawab berbagai pertanyaan terkait gejala di atas. Apa yang terjadi di Bima dalam dua dekade terakhir terkait terorisme? Siapa saja tokoh-tokoh kuncinya dan bagaimana benih-benih terorisme di sana tumbuh? Jenis ideologi dan masyarakat radikal seperti apa yang berkembang di sana? Sejauh mana upaya-upaya binadamai berlangsung?

Laporan ini menggarisbawahi tiga kesimpulan pokok. *Pertama*, perkembangan terorisme di Bima adalah tantangan pengelolaan demokrasi yang sangat berat: Aksi-aksi yang terkait dengannya dan dampaknya yang besar sudah cukup terdokumentasikan; setidaknya sebagian aktor, kelompok, dan jaringan teror di dalamnya sudah teridentifikasi; dan ideologi-ideologi pendukung kekerasan ekstremisme yang

mendasarinya sudah dikenal. Terorisme di wilayah itu juga memiliki akar-akar cukup dalam.

Kedua, di Bima terdapat lingkungan sangat radikal yang mengembangkan pemikiran dan praktik keislaman yang anti-sistem yang dinilai *thaghut* dan membolehkan cara-cara kekerasan, khususnya di Kelurahan Penatoi. Tetapi di Bima juga ada lingkungan radikal yang lebih luas, di mana cita-cita Islamisme memperoleh dukungan kuat. Hubungan di antara lingkungan radikal dan kelompok ekstremis kekerasan berlangsung dalam cara-cara yang dinamis, yang bukan saja mendukung tetapi juga mengekang dan meredam perkembangan lebih jauh kelompok yang terakhir.

Akhirnya, *ketiga*, meskipun ada lingkungan radikal di Bima, di wilayah itu juga kita temukan langkah-langkah penguatan infrastruktur binadamai yang berlangsung cukup baik. Langkah-langkah ini berlangsung di sektor keamanan, terutama polisi, bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi, dan penguatan hubungan-hubungan sosial di antara kelompok masyarakat dan negara, khususnya melalui lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bima. Sayangnya, langkah-langkah ini belum memperoleh dukungan seperti yang seharusnya.

Jakarta, Mei 2019

EKSTREMISME KEKERASAN DI BIMA, NUSA TENGGARA BARAT: LINGKUNGAN RADIKAL DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

Ihsan Ali-Fauzi • M. Irsyad Rafsadie • Dyah Ayu Kartika

I. PENDAHULUAN

Pada 8 dan 9 Mei 2018 lalu, satu insiden menghebohkan terjadi di Rumah Tahanan Markas Korps (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, ketika 155 orang narapidana teroris (napiter) yang ditahan di sana memberontak terhadap para sipir penjara. Akibat peristiwa yang seluruhnya berlangsung 36 jam itu, lima orang polisi dan satu orang napiter tewas terbunuh. Selain polisi, dua napiter menjadi tokoh kunci dalam peristiwa itu: Iskandar alias Abu Qutaibah, yang dipercaya memimpin dan menjadi jurubicara para napiter pemberontak; dan Aman Abdurrahman alias Oman Rochman, seorang napiter lain yang ditahan di tempat terpisah tetapi rekaman nasihat dan “fatwa”-nya kepada para napiter pemberontak, yang dibawa masuk polisi, berhasil meredam gejolak mereka dan memungkinkan negosiasi yang mengakhiri insiden.

Sementara peristiwa kekerasan di atas diliput sangat luas media massa, baik dalam maupun luar negeri, termasuk media milik Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS),¹ tidak banyak perhatian diberikan kepada dua tokoh kunci yang disebut di atas. Iskandar adalah laki-laki keturunan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan cukup dikenal di kalangan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), organisasi bentukan Abu Bakar Ba’asyir yang mendukung ISIS, karena dia berjasa membentuk cabang JAT di Bima. Sedang Aman adalah laki-laki kelahiran Sumedang, Jawa Barat, pendiri Jamaah Anshorud Daulah (JAD) yang

¹ Media ISIS mengklaim bahwa para napiter yang memberontak adalah bagian dari pengikutnya dan berbaiat kepadanya. Lihat “Mako Brimob riot: Islamic State claims standoff with anti-terror squad,” *Jakarta Post*, 9 May 2018, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/09/mako-brimob-riot-islamic-state-claims-standoff-with-anti-terror-squad.html> (diakses 20 Februari 2019).

juga berbaiat ke ISIS, ideolog kekerasan ekstremis paling berpengaruh dan otak berbagai serangan teroris selama beberapa tahun terakhir di Indonesia. Menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC, 2018), hubungan keduanya sudah berlangsung sangat lama, sejak awal 2000-an, dengan Bima sebagai salah satu simpulnya. Belakangan mereka berdua, yang sudah bisa disebut murid dan guru itu, amat berjasa membesarkan Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan jaringan menyebar bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional, berkat pengiriman mujahidin misalnya ke Suriah.

Insiden di atas beserta ketokohan Iskandar dan Aman di dalamnya menimbulkan tanda tanya mengenai perkembangan terorisme, atau ekstremisme kekerasan, di Bima. Apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu dalam dua dekade terakhir terkait terorisme? Siapa saja tokoh-tokoh kunci yang “menanam” dan “membesarkan” terorisme di Bima dan bagaimana hal itu dilakukan? Bagaimana para elite di Bima memandang perkembangan ini? Apakah perkembangan itu memiliki akar dalam sejarah kontemporer Bima (atau Indonesia) sendiri?

Laporan ini disusun berdasarkan riset yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Hingga saat ini para ahli dan penentu kebijakan belum dapat merumuskan definisi tunggal tentang “terorisme” (ICSR, 2017). Salah satu masalah utamanya adalah karena istilah ini memiliki konotasi negatif dan pelabelan atas suatu kelompok sebagai teroris yang didorong motif yang sangat politis dan subjektif. Karenanya, sangat sulit untuk merumuskan definisi terorisme yang terlepas dari logika “teroris bagi satu pihak adalah pejuang kemerdekaan bagi pihak lain” (*one man’s terrorist is another man’s freedom fighter*).

Dalam konteks ini, istilah “ekstremisme kekerasan” (*violent extremism*) dianggap bisa menjadi istilah alternatif untuk menyebut fenomena terorisme. Konsep ini dianggap lebih netral dan dapat mencakup berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Ekstremisme sendiri dipahami sebagai ideologi yang berlawanan dengan nilai dan prinsip demokrasi: Mengabaikan kehidupan, kebebasan, dan hak-hak orang lain. Aksi-aksi kekerasan ekstremisme termasuk menimbulkan kekacauan bermotif politik, *hate crimes*, serta operasi-operasi bergaya militer yang sering kita temui dalam aksi-aksi terorisme, seperti pengeboman, penembakan, penyerangan, dan lainnya. Oleh sebab itu, kedua istilah di atas akan kami gunakan di sini secara bergantian dalam makna yang sama.

Selain memberi semacam “peta” kontemporer terorisme di Bima, tujuan kedua laporan ini adalah mendiskusikan apa yang disebut “lingkungan radikal” (*radical milieu*) dalam literatur mengenai terorisme atau ekstremisme kekerasan, berbekal data-data yang kami peroleh dari Bima. Konsep ini digunakan untuk membantu memusatkan analisis pada dinamika di kalangan yang mendukung atau menggunakan kekerasan, yang mestinya hanya sebagian kecil dari suatu masyarakat. Sederhananya, yang dimaksud lingkungan radikal di sini adalah lingkungan sosial terdekat dari kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki pandangan yang sama dengan mereka dan, dalam taraf tertentu, mendukung mereka secara moral maupun logistik.² Istilah “lingkungan” di sini menyiratkan proses

² Konsep ini terutama dikembangkan dari studi-studi gerakan sosial serta studi-studi yang menekankan

interaksi beragam aktor, dan bukan sekadar ide, keyakinan atau persepsi abstrak. Sementara “radikal” di sini terutama menyiratkan bentuk aksi, tujuan, serta sikap mutlak-mutlakan dan menyetujui kekerasan. Penerimaan pada kekerasan ini menjadi pembeda utama lingkungan radikal dari lingkungan lainnya.

Karena itu, lingkungan radikal di sini tidak dipahami sebagai konteks yang statis dan abstrak, tetapi sebagai “medan relasional yang dinamis dan terus berkembang, yang di dalamnya terdapat berbagai individu dan kelompok yang mengupayakan kepentingannya, berinteraksi, berkolaborasi, dan kadang bertentangan atau berkonfrontasi dengan aktivis yang lebih ekstrem atau keras” (Malthaner dan Waldmann, 2014: 2). Kami berusaha memahami lingkungan pendukung kelompok ekstremis kekerasan di Bima ini dengan menanyakan bagaimana kemunculannya, bentuknya, dan apa peran serta pengaruhnya. Untuk itu, kami menyoroti interaksi antara lingkungan radikal ini, baik dengan kelompok ekstremis kekerasan maupun dengan lingkungan yang lebih luas, termasuk pemerintah, aparat keamanan, kelompok atau gerakan lain, serta masyarakat Bima pada umumnya (bandingkan dengan Jones, 2016).

Akhirnya, ketiga, dalam laporan ini kami juga akan memaparkan dan mendiskusikan langkah-langkah binadamai (*peacebuilding*) yang kami temukan di Bima dalam rangka menangkal perkembangan terorisme di atas. Kata kunci dari binadamai adalah hubungan-hubungan yang harus dijalin secara strategis, baik oleh mereka yang berada di dalam situasi konflik kekerasan maupun di luarnya. Langkah-langkah binadamai berguna untuk mencegah, mengurangi, mengubah, dan membantu orang-orang untuk berhasil keluar dari lingkaran kekerasan dalam berbagai bentuknya. Pada saat yang sama, binadamai memperkuat orang untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial pada semua tingkatan, hingga hidup dan lingkungan mereka yang mulai kembali bersahabat bisa terus dipertahankan. Bagi sarjana dan pegiat binadamai seperti Lisa Schirch, hubungan-hubungan ini adalah satu bentuk kuasa (*power*) atau modal sosial: “Ketika orang-orang mulai mengulurkan tangan dan saling berhubungan, mereka lebih mungkin untuk bekerja bersama menyelesaikan konflik” (2004: 8-9).

Laporan ini disusun berdasarkan wawancara dengan 27 narasumber di Kota Bima dan Kabupaten Bima.³ Mereka terdiri dari wakil pemerintahan, termasuk jajaran pemerintahan daerah dan kepolisian resor, serta badan-badan seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kami juga mewawancarai tokoh-tokoh agama, kalangan pendidik dan tokoh-tokoh pemuda, termasuk ikhwan dan jihadis yang pernah terlibat dalam ekstremisme kekerasan. Untuk menangkap suara kaum perempuan, kami juga sengaja mewawancarai beberapa istri atau janda di Bima, yang anggota keluarga mereka terkait dengan konflik kekerasan di Bima atau tempat-tempat

perspektif relasional dan kontekstual dalam melihat kekerasan politik yang menekankan pada pola hubungan dan dinamika interaksi (misalnya Alimi, 2011; Alimi, Bosi, dan Demetriou, 2012). Untuk uraian selengkapnya mengenai konsep lingkungan radikal ini, lihat Waldmann (2008) serta Malthaner dan Waldmann (2014).

³ Dalam laporan ini, sebagian nama narasumber ditulis sesuai aslinya, sedang sebagian lainnya tidak, sesuai kesepakatan kami dengan mereka. Kecuali disebutkan lain, wawancara dilakukan ketiga penulis laporan ini, yang mewakili tim peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.

lainnya. Selain dari wawancara seperti sudah disebutkan, penulisan laporan ini juga diperkuat observasi lapangan dan studi kepustakaan, termasuk dengan mengikuti liputan media massa di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Sepengetahuan kami, sejauh ini belum ada laporan, apalagi studi mendalam dan sistematis, mengenai ekstremisme kekerasan di Bima, kecuali beberapa terbitan IPAC seperti sudah disebutkan, yang juga menjadi sumber utama laporan ini. Dilihat dari sudut ini, laporan ini harus disebut sebagai rintisan awal yang harus dilanjutkan studi-studi berikutnya.

Ada tiga kesimpulan pokok yang ingin digarisbawahi dalam laporan ini. *Pertama*, perkembangan terorisme di Bima dalam dua dekade terakhir adalah masalah serius dan tantangan pengelolaan demokrasi yang berat di Indonesia: Aksi-aksi yang terkait dengannya dan dampaknya yang besar, baik di Bima maupun di luarnya, sudah cukup terdokumentasikan; setidaknya sebagian aktor, kelompok, dan jaringan teror di dalamnya sudah teridentifikasi; dan ideologi-ideologi pendukung kekerasan ekstremisme yang mendasarinya sudah cukup dikenal. Selain itu, terorisme di wilayah itu memiliki akar-akar cukup dalam di dalam sejarah Bima (atau Indonesia) kontemporer dan alasan-alasan pendorong dan pendukung yang cukup kuat.

Kedua, di Bima terdapat lingkungan radikal yang bukan saja mendukung tetapi sebenarnya juga mengekang kelompok-kelompok ekstremis. Lingkungan radikal ini terdiri dari kantong radikal khususnya di Kelurahan Penatoi yang bersikap tertutup, mengembangkan pemikiran dan praktik keislaman yang anti-sistem yang dinilai *thaghut* karena merupakan buatan manusia, dan hingga tingkat tertentu membolehkan penggunaan cara-cara kekerasan. Akan tetapi di Bima juga ada lingkungan radikal yang lebih luas lagi, di mana cita-cita Islamisme memperoleh tempat dan dukungan yang kuat. Hubungan di antara lingkungan radikal dan kelompok ekstremis kekerasan berlangsung dalam cara-cara yang dinamis, yang bukan saja mendukung tetapi juga mengekang dan meredam perkembangan lebih jauh kelompok yang terakhir. Di antara bagian penting dalam lingkungan radikal di atas adalah kelompok perempuan yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka yang tewas terbunuh dalam aksi-aksi terorisme di Bima sendiri atau di luarnya.

Akhirnya, *ketiga*, meskipun ada lingkungan radikal di Bima, di wilayah itu juga kita temukan langkah-langkah penguatan infrastruktur binadamai yang berlangsung cukup baik. Langkah-langkah ini berlangsung di sektor keamanan, terutama oleh polisi, bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi, dan penguatan hubungan-hubungan sosial di antara kelompok masyarakat dan negara, khususnya melalui lembaga seperti FKUB di Bima. Sayangnya, langkah-langkah ini belum memperoleh dukungan seperti yang seharusnya.

Ketiga kesimpulan di atas akan kami uraikan dan diskusikan satu per satu di bawah ini. Akhirnya, laporan ini kami tutup dengan tawaran rekomendasi kepada pihak-pihak yang relevan.

II. EKSTREMISME KEKERASAN DI BIMA

Masalah terorisme adalah masalah sangat peka di Bima. Tidak banyak orang bersedia

bicara terbuka mengenainya, apalagi ketika mereka tahu bahwa kita sedang mengumpulkan informasi. Karenanya, tidak mengejutkan jika belakangan perbincangan tentang misalnya kembalinya Jumiatus alias Umi Delima, istri kedua almarhum Santoso, pendiri Mujahidin Indonesia Timur (MIT), ke Bima harus dilakukan sambil berbisik-bisik (lihat lebih jauh di bawah).

Ketika kita bertanya masalah ini kepada orang-orang di Bima, kita biasanya mendapatkan dua jenis tanggapan berbeda. Di satu sisi, aparat keamanan seperti polisi akan segera memberitahu kita bahwa masalah itu memang ada, tetapi pengaruhnya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, khususnya di Kelurahan Penatoi, dan bahwa gerak-gerik mereka sudah dan akan terus diawasi. Mereka biasa menyebut kelompok itu sebagai kelompok Igaras (Islam garis keras). Di sisi lain, pada umumnya tokoh agama dan tokoh masyarakat akan memberikan tanggapan yang lebih defensif: bahwa pelaku aksi-aksi terorisme di Bima bukan orang asli Bima; bahwa meskipun tertutup, mereka hidup di lingkungan mereka sendiri dan tidak mengganggu orang banyak; dan yang seperti itu. Ringkasnya, terkait terorisme, kita merasa ada semacam konspirasi “mari bersama menjaga nama baik Bima dari keburukan terorisme.”

Meski disampaikan secara berbeda, kedua tanggapan di atas sama-sama merendahkan ancaman terorisme di Bima. Semua orang yang berkepentingan mengerti bahwa Bima adalah titik penting dalam perkembangan terorisme di Indonesia – setidaknya sepanjang dua dekade terakhir, tetapi dengan akar sejarah lebih panjang. Dokumentasi mengenainya sudah cukup banyak, beberapa di antaranya bahkan viral melalui YouTube. Dan kita juga tahu bahwa jumlah bukan segalanya di sini: Terorisme tidak memerlukan banyak orang untuk membawa kerusakan yang besar.

1. “Peta” Besar Ekstremisme: Aksi, Aktor, dan Jaringan

Bima belakangan ini menjadi salah satu lokus penting dalam jaringan terorisme di Indonesia. Para ekstremis Bima sudah lama beraksi di tingkat nasional maupun internasional seperti di Poso, Suriah, dan daerah konflik lain di Timur Tengah. Sementara aktif di luar Bima, tidak banyak aktivitas yang dilakukan para jihadis di dalam Bima sendiri. Jika pun ada, aksi-aksi itu terkesan tidak profesional dan berskala kecil sehingga tidak mendapat perhatian media nasional maupun internasional (IPAC, 2015b). Salah satu peristiwa yang terjadi di Bima adalah meledaknya bom rakitan yang tersimpan di Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), Kabupaten Bima, pada 2011. Peristiwa ini menewaskan salah satu pengajar UBK sekaligus menuntun kepolisian untuk membuka jaringan terorisme yang bersembunyi di sana (ICG, 2012: 14).

Aksi-aksi teror di Bima lebih banyak ditujukan kepada polisi. Penyerangan pernah terjadi pada 30 Juni 2011, ketika salah satu murid Pesantren UBK menusuk anggota polisi hingga tewas. Aksi penyerangan ke polisi semakin marak sesudah 2014, setelah ISIS mendeklarasikan kekhilafahan dan mendapat dukungan dari Bima. Pada 28 Maret 2014, kepala unit narkoba Bima ditembak. Kasus ini cukup kontroversial karena sebagian masyarakat semula percaya bahwa pelakunya bukan dari jaringan teroris melainkan karena seseorang yang punya dendam personal kepada polisi. Pada 2 Juni 2014, kepala

intelijen dibunuh di Bima, dan pada 16 Agustus 2014, Iptu Abdul Salam, kepala polisi Ambalawi ditembak (IPAC, 2015b: 13). Terakhir, dua anggota polisi diserang pada 11 September 2017,⁴ meski aksi berakhir gagal dan pelakunya berhasil ditangkap.

Berbagai aksi teror ini tidak terlepas dari sejarah organisasi ekstremisme kekerasan di Bima sejak 2004. Pesantren UBK dibangun di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, pada tahun itu oleh Abrory dan Uqbah, dua lulusan pesantren yang berafiliasi ke Jamaah Islamiyah (ICG 2012: 13-14). Abrory adalah lulusan Pesantren Al Muttaqien di Jepara, Jawa Tengah. Dia mengaku pernah mendapat latihan militer di Ambon pada 2001 dan di Poso bersama Santoso pada Mei 2011. Uqbah lebih berperan sebagai pemberi suaka dan pemasok dana untuk berbagai aktivitas terorisme, termasuk pengeboman hotel oleh Noordin M. Top pada 2008 dan pembiayaan kamp militer JAT di Aceh yang pada 2010, berhasil digagalkan polisi.

Setelah Ba'asyir mendirikan JAT pada 2008, para petingginya berusaha memperkuat basis gerakan melalui jaringan-jaringan JI yang ada. Salah satunya adalah Ubaid, petinggi JAT yang juga teman sekelas Uqbah. Dia mengajak Uqbah bergabung dan Uqbah setuju. Dalam prosesnya, beberapa senior JAT mengunjungi Bima, termasuk Ba'asyir. Dia tiga kali berkunjung ke Bima selama 2009-2010. Dalam salah satu kunjungannya, dia sempat bertandang ke Pesantren UBK dan berceramah di sebuah masjid dekat pesantren itu.

Berdirinya JAT di Bima memungkinkan adanya pergerakan bantuan finansial dan sumber daya manusia dari Bima ke jaringan terorisme yang lebih luas. Sejak 2009, Uqbah tercatat melakukan empat kali pengiriman uang ke Ubaid untuk menyantuni hidup keluarga para mujahidin, menghidupi pesantren JI, mendukung berbagai aksi jihad, dan sebagiannya untuk pendirian kamp militer JAT di Aceh. Para mujahidin dari Bima juga berhasil diberangkatkan ke Poso untuk mengikuti latihan militer. Pengiriman mujahidin ini difasilitasi Hari Kuncoro, ipar Dulmatin yang baru saja pulang dari Mindanao dan mendapatkan suaka di Bima. Hari juga memberikan latihan militer di Pesantren UBK dan menjadi penyalur senjata untuk Abrory sebelum akhirnya ditangkap pada 2011.

Aktivitas JAT di Pesantren UBK tidak berlangsung lama. Polisi mulai memantau gerak-gerik Pesantren UBK sesudah satu anggotanya dibunuh oleh seorang santri Pesantren UBK pada 30 Juni 2011, yang disusul meledaknya bom rakitan yang menewaskan Firdaus, seorang pengajar di pesantren itu pada 11 Juli 2011 (IPAC 2014: 16). Polisi pun mengepung dan menyerang Pesantren UBK pada 15 Juli 2011. Di dalam pesantren, polisi menemukan barang bukti berupa bom rakitan dan peta polsek Madapangga yang diduga menjadi target serangan teror berikutnya (ICG 2012: 15). Atas kejadian dan bukti-bukti yang ada, Abrory selaku pimpinan pesantren pun ditangkap dan Pesantren UBK dihentikan aktivitasnya.

Saat Pesantren UBK mulai mengembangkan pengaruhnya di Kabupaten Bima, Iskandar mengembangkan ajaran serupa di Masjid Istiqomah, Kelurahan Penatoi (IPAC 2014: 8). Dia menjadi salah satu tokoh kunci berkembangnya JAT dan MIB di Bima.

⁴ Lihat "7 identitas terduga teroris di Bima berhasil diungkap," *Tirto.id*, 1 November 2017, <https://tirto.id/7-identitas-terduga-teroris-di-bima-berhasil-diungkap-czrv> (diakses 18 Mei 2019).

Sebelumnya, dia dididik di Pesantren Lukmanul Hakiem, sekolah yang berafiliasi dengan JI. Dia lalu melanjutkan pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Jakarta dan tinggal di Tanah Abang bersama kakaknya. Melalui pengajian-pengajian di Masjid At-Taqwa, Tanah Abang, dia mengenal Aman Abdurrahman. Pada 2004, dia kembali ke kampung ayahnya di Bima dan mulai menyebarkan ajaran-ajaran Aman. Setelah Aman bebas pada 2009, dia mengundang Aman ke Bima untuk berceramah di Masjid Istiqomah dan mengajar di Pesantren UBK.

Meskipun Pesantren UBK berhenti beraktivitas pada 2011, kerja-kerja Iskandar untuk menyebarkan ajaran Aman terus berlanjut. Namun pandangan sangat ekstrem kelompok ini juga memecah kelompok jihadis yang lebih luas, karena tidak semua mereka setuju dengan pandangan ini. Perpecahan ini juga mempengaruhi napiter yang berada dalam penjara, termasuk Ba'asyir. Setelah sempat tidak mengakui, Ba'asyir kemudian turut berbaiat kepada ISIS setelah negosiasi panjang dengan pendukung ISIS dan diperkuat deklarasi ISIS pada 2014. Posisi ini menguatkan pengaruh anggota JAT yang pro-ISIS di berbagai tempat, termasuk Bima. Iskandar sempat diminta Aman untuk mengatur sedemikian rupa agar anggota JAT yang tidak berbaiat kepada ISIS tidak mendapat "panggung" di masjid-masjid Bima (IPAC, 2015a: 13).

Selain kiprahnya di JAT, kontribusi Iskandar pada MIB juga besar (IPAC, 2013: 12). Melaluinya, Abu Roban dan Robhitoh (pemimpin MIB) mendapat akses ke mujahidin Bima dan mendiskusikan rencana membuka kamp latihan di sana. Kamp itu disiapkan untuk melatih anggota MIB Lampung, sel Darul Islam (DI) di Makassar, serta MIT di Poso. Hal ini terwujud dengan pengiriman kloter pertama mujahidin Lampung ke Bima pada Desember 2012. Tetapi, polisi mengetahui rencana ini dan pada 5 Januari 2013, mereka menembak tiga orang yang terlibat dalam kamp militer tersebut dan tempat pelatihan ini pun ditutup.

Pada 2017, Iskandar masuk ke dalam penjara untuk kedua kalinya (IPAC, 2018b: 8). Sebelumnya dia dipenjara pada 2016 karena terlibat dalam aksi MIB, yaitu perampokan (*fa'i*) dan pembuatan kamp militer di Bima (IPAC, 2014: 15). Dipenjara tidak membuatnya jera, tetapi justru semakin ekstrem. Dia menjadi salah satu napiter pertama yang berbaiat kepada ISIS pada 2014 dan menjadi juru bicara dalam kericuhan di Mako Brimob, seperti disinggung di awal laporan ini. Saat ini dia ditahan di Penjara Pasir Putih, Nusakambangan.

Selain mereka, dari Bima juga muncul beberapa tokoh perempuan yang turut aktif dalam kelompok ekstremisme kekerasan. Di antaranya adalah tiga perempuan yang menjadi istri-istri pemimpin MIT di Poso, seperti akan dipaparkan lagi di bawah.

2. Peta Ideologi Radikal di Bima

Ideologi radikal yang berkembang di Bima dapat ditarik hingga ke gerakan DI pada awal kemerdekaan. Beberapa aktivis Bima juga ambil bagian dalam gerakan *usroh* yang sering dikait-kaitkan dengan JI. Pasca peristiwa Talangsari, Lampung, pada 1989, sejumlah aktivis Muslim di Bima ditangkap karena dituduh terlibat di jaringan pengajian *usroh* yang sama dan dianggap sebagai pengacau dan anti-pemerintah. Mereka yang ditangkap dituduh merencanakan aksi makar dengan membakar pom bensin dan meledakkan

jembatan.⁵

Pada 1980-an, di tengah gencarnya represi negara, JI bergerak di bawah tanah dengan jaringan rapi dan tertutup. Mereka juga terhubung dengan jaringan kelompok lain di luar negeri. Selain disatukan cita-cita bersama untuk menegakkan Syariat dan mewujudkan negara Islam, mereka juga disatukan oleh perasaan senasib sebagai korban dari kekuatan anti-Islam di tingkat nasional maupun internasional. Sesudah Reformasi pada 1998, terbukanya struktur kesempatan politik pasca-Orde Baru membuat ruang gerak JI menjadi lebih leluasa dan memunculkan beberapa kelompok baru. Salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dibentuk Abu Bakar Ba'asyir pada 2000. Konflik komunal dan ketegangan pada masa transisi demokrasi, serta konflik-konflik lain yang melibatkan kaum Muslim di Asia dan Timur Tengah, memberi legitimasi bagi mereka untuk melancarkan aksi kekerasan dan menarik lebih banyak pengikut.

Tetapi jaringan-jaringan di atas kembali terpojok setelah konflik komunal mereda dan upaya-upaya penanganan kekerasan teror gencar dilakukan. Pada 2008, Ba'asyir mengundurkan diri dari MMI yang didirikannya pada 2000 dan membentuk JAT. Berbeda dari JI yang cenderung tertutup, struktur organisasi JAT relatif terbuka dan perekrutannya pun dilangsungkan lewat pengajian-pengajian umum. Ini membuat JAT berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Meski mengklaim sebagai organisasi terbuka dan legal, mereka tetap menyerukan jihad kepada musuh-musuh Islam dan diam-diam mempersiapkan diri, misalnya dengan mengembangkan pesantren dan kamp pelatihan, memberi suaka, dan menggalang dana. Seperti digambarkan sebelumnya, upaya-upaya tersebut banyak dilakukan di Bima oleh JAT. Dari Bima, mereka juga mengembangkan jaringan di daerah lain seperti Poso, Aceh, dan Lampung.

JAT pecah ketika ISIS mendeklarasikan kekhalifahan pada 2014. Ba'asyir dan sebagian anggota JAT berbaiat kepada ISIS, tetapi sebagian besar yang lainnya menolak berbaiat. Ba'asyir kemudian meminta mereka yang menolak berbaiat untuk keluar dari jamaah. Mereka yang menolak termasuk putra Ba'asyir sendiri, yaitu Abdurrahim Ba'asyir. JAT di berbagai wilayah kemudian mendekalarsikan Jamaah Ansharus Syariah (JAS) sebagai organisasi nasional pada 2014. Sedangkan mereka yang mendukung ISIS, yang sebagian besar berasal dari jaringan JAT di Jawa Barat, membentuk Jamaah Ansharu Daulah (JAD), dipimpin oleh Aman Abdurrahman. Seorang petinggi JAT dan JAS di Bima menjelaskan pertimbangan mereka sebagai berikut:

Ustaz Abu Bakar Ba'asyir adalah orang tua kita. ... karena semangatnya, kerinduan untuk tegaknya khilafah, tetapi beliau sudah dipenjara, tidak banyak [mendapat] informasi. Sehingga dua anaknya, keduanya sekolah di Mekkah, orang alim, menasihati beliau ... [tetapi] tidak mempan. Kami pun tak ada yang didengar. Akhirnya terpaksa ... tetapi kita akui

⁵ Wawancara dengan mantan seorang petinggi JAT di Bima yang turut ditahan dalam kasus ini, 12 Februari 2019. Dari pengalaman ini, menurutnya, semua gerakan Muslim pasti selalu disusupi dan diprovokasi untuk menjaring semua aktivis Islam, terlebih kelompok-kelompok yang cenderung terbuka dan frontal seperti kelompok pendukung ISIS. Karena itu, dia menolak bergabung dengan para pendukung ISIS.

orang tua itu luar biasa ... Nasihatnya, “Kalian kalau tidak mau ikut saya, jangan berjuang sendiri, kalian *bikin* [bentuk] jamaah lagi.” Kami tidak *ta`ashshub*, tidak boleh fanatik kepada guru, kepada lembaga. Kita introspeksi. Langkah-langkah yang kita anggap tak tepat kita ubah. Kita benahi. ... JAS sekarang ingin berjuang bersama-sama umat. Merangkul semua umat. Kita sudah tidak bicara lagi NU, Muhammadiyah, Persis. Ayo, sama-sama. Perbedaan-perbedaan kecil, kunut atau tidak kunut, itu tidak jadi masalah. Ayo, kita berislam yang benar kemudian mari kita sama-sama.⁶

Mereka yang menolak berbaiat merasa banyak informasi yang simpang siur terkait ISIS dan tidak setuju dengan strategi dan taktiknya. Salah satu petinggi JAS di Bima menyatakan, “Kalau khilafah munculnya seperti itu, yang paling layak ya Taliban. Taliban sudah punya semuanya. [Pada] 1996 hampir seluruh Afghanistan dikuasai, sudah punya segala-galanya... tetapi dia [mereka] tidak berani mengumumkan khilafah.”⁷ Mereka juga tidak membenarkan paham takfiri yang mudah mengkafirkan orang lain sehingga halal darahnya, dan menentang kekerasan para pendukung ISIS yang membabi buta dan menyasar orang tidak bersalah.

Namun meski menolak ISIS, pandangan-pandangan JAS tentang kepastian khilafah dan hari akhir tidak begitu berbeda dari ISIS. Mereka percaya, dengan mengutip Hadis yang sama dengan yang dikutip pendukung ISIS, bahwa saat ini kaum Muslim tengah menyongsong fase kelima “*khilafah `ala minhaj al-nubuwwah*” (kekhalifahan menurut mazhab kenabian), setelah berjatuhnya para diktator dunia pada fase yang sekarang. Mereka juga meyakini tanda-tanda akan datangnya fase kelima ini, yaitu munculnya “panji-panji hitam”. Kata seorang pimpinan JAS di Bima, “Kelompok-kelompok [pendukung khilafah] itu namanya bermacam-macam. Itu *wasilah*, kendaraan, *tariqah*. Lewat siapa pun tak ada masalah. Tugas kita bersama-sama.”⁸

Jika kelompok JAS cenderung berprasangka baik dan tidak mengkafirkan kelompok lain, tidak demikian dengan para pendukung ISIS. Mereka tidak segan mengkafirkan semua kelompok yang berbeda dengan kelompoknya. Friksi antara pengikut JAT yang mendukung dan menolak ISIS cukup keras. Seorang mantan petinggi JAT yang kini memimpin JAS mengaku beberapa binaannya kini membuang muka dan tak mau menyapa ketika berpapasan dengannya. “Padahal mereka baru mengaji setahun [atau] dua tahun.... Tapi saya tidak bisa melarang orang mengaji... Saya dituduh macam-macam... Saya ini kalau bisa mau ‘ditelan’ oleh mereka,” katanya.⁹

Belakangan, sebagian besar pendukung ISIS menggabungkan diri dalam JAD. Dibentuk pada 2015, JAD melembagakan lebih lanjut kelompok Tauhid wal Jihad yang didirikan Aman Abdurrahman pada 2004. Selain menarik mantan anggota JAT, mereka juga melebarkan jaringannya dengan merekrut anggota baru dari luar jaringan

⁶ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, mantan pimpinan JAS di Bima, 12 Februari 2019.

⁷ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, 12 Februari 2019.

⁸ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, 12 Februari 2019.

⁹ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, 12 Februari 2019.

sebelumnya. Daya tarik ISIS dan gencarnya perekrutan mereka membuat kelompok JAD berkembang pesat dan memiliki perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti digambarkan di bagian sebelumnya, kelompok JAD di Bima sebagian besar berbasis di Kelurahan Penatoi. Selain JAD, pendukung ISIS juga bergabung dalam Jamaah Ansharul Khilafah (JAK) yang dipimpin Abu Husna. Tetapi kelompok ini kalah dari JAD dari segi pengaruh dan sebaran wilayah (Schulze dan Liow, 2018).

Kemunculan kelompok-kelompok tadi berlangsung di tengah aneka ragam organisasi masyarakat (ormas) dan gerakan Islam lainnya yang “berjihad dengan dakwah” dan “amar makruf nahi munkar”. Selain organisasi lama seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, beberapa organisasi baru juga berkembang pesat. Di antara yang paling menonjol adalah Forum Umat Islam (FUI) yang berdiri pada 2014, terutama dalam rangka menolak pembangunan Pura Tambora. Beberapa penggerak utama FUI adalah JAS, Majelis Dakwah Islam Indonesia (Madinah), An-Naba, dan Brigade BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia).

Sempat dicurigai pemerintah pada awal berdirinya, FUI belakangan mendapatkan kepercayaan dan bahkan mengalahkan pamor MUI, yang sebagian besar anggotanya berasal dari NU, dalam menggalang organisasi Islam lainnya. Mereka melakukan penggalangan dana untuk korban bencana dan mengelola pengajian yang penceramahnya digilir dari berbagai organisasi di atas. Mereka juga mengkoordinasi aksi-aksi bersama dalam menanggapi berbagai isu nasional seperti terkait LGBT, komunisme, penodaan agama, pembakaran bendera tauhid, dan protes atas kriminalisasi ulama, maupun isu lokal seperti kemaksiatan.¹⁰ Kini, setiap akan melakukan aksi, seperti *sweeping* pada malam tahun baru atau pada hari Valentine, mereka selalu mengirimkan surat pemberitahuan dan ajakan kepada organisasi-organisasi lain dan pemerintah (Dandim, Polres, dan Pemda) untuk melakukan “pendampingan”.

Kelompok-kelompok di atas adalah kelompok yang “legal” dan beroperasi di atas permukaan. Kelompok-kelompok ini menjadi lingkaran terdekat dari kelompok-kelompok yang lebih ekstrem dan “illegal” di bawah tanah.

3. Sebab-sebab Dukungan dan Keterlibatan: Pandangan Elite Bima

Paparan di atas menunjukkan tersedianya bukan saja dukungan kepada kekerasan ekstremisme di kalangan masyarakat Bima, tetapi juga kesiapan untuk terlibat di dalamnya. Dari mana dukungan dan kesediaan ini muncul? Bagaimana para elite Bima sendiri menjelaskannya?

Ada beberapa penjelasan kultural yang biasa disampaikan terkait hal ini. Salah satu penjelasan paling umum adalah dekat atau bahkan identiknya budaya Bima dengan budaya Islam, agama yang dipeluk hampir seluruh warganya (98,51% di Kota Bima dan 99,50 % di Kabupaten Bima).¹¹ Karena alasan ini, setiap warga Bima akan segera terpancang ketika

¹⁰ Wawancara dengan Asikin, Ketua FUI Bima, 12 Februari 2019.

¹¹ Biro Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016,” <https://ntb.bps.go.id/>

sentimen keislamannya tersentuh. Dalam sejarahnya, dari 1620 hingga 1958, Bima adalah ibukota Kesultanan Bima Mbojo, satu kerajaan Islam.¹² Selain sebagai warisan sejarah, Islam di Bima sekarang juga mencirikan kekhasan wilayah itu dibanding tetangganya di sebelah barat, Provinsi Bali, yang didominasi umat Hindu, dan tetangganya di sebelah timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang didominasi umat Katolik. “Orang-orang Bima boleh tidak salat, tapi jangan sekali-kali berani di depan mereka menjelek-jelekan Islam,” kata satu narasumber. Beberapa anekdot mencerminkan hal ini, misalnya: “Di Bima, seorang pencuri pun akan mengucap *basmalah* sebelum mencuri sepeda motor.”¹³ Karena alasan ini, kata seorang ustaz dan aktivis FKUB di Bima, “Orang-orang Bima akan rela direkrut untuk maju paling depan [dalam membela Islam], atau [mati] terbunuh atas nama solidaritas Islam.”¹⁴

Penjelasan lainnya terkait watak orang-orang Bima yang biasa disebut dalam kata-kata seperti “keras”, “tegas”, “nekat”, “pantang menyerah”, atau “tidak mau mengalah”. Sebagian narasumber mengaitkan hal ini dengan cuaca di Bima yang panas dan ladangnya yang kering dan tandus. Hal ini sering kali juga dihubungkan dengan pengutamaan atas “maskulinitas” dan ketegasan model tentara (dibanding model polisi) di kalangan masyarakat Bima.

Orang-orang di Bima juga sering kali dengan bangga menyebut bahwa mereka “terbuka”, “suka bergaul”, “tipikal masyarakat yang *welcome*,” dan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, mereka senang menyebut kebiasaan bermigrasi orang-orang Bima, yang dulu dilakukan lewat berlayar karena posisi geografis Bima yang di tepi laut. Masih terkait dengan sifat-sifat ini, satu sifat lain orang-orang Bima yang juga banyak disebut adalah kebiasaan mereka untuk selalu menghargai tamu dan menjaga keselamatannya karena sang tamu adalah “seperti saudara sendiri.” Dalam kaitannya dengan terorisme, menurut beberapa narasumber, keterbukaan terhadap orang-orang luar dan sikap hormat kepada tamu di atas kadang mempermudah masuknya orang-orang yang diburu aparat ke Bima dan wilayah ini menjadi tempat persembunyian yang aman (*save heaven*). Eka Iskandar Zulkarnain, seorang pemimpin Muhammadiyah dan mantan Ketua FKUB Kota Bima, misalnya, menyatakan:

Di Bima ada budaya menghormati tamu, disebut “hera”. Ini kebiasaan memperlakukan tamu seperti keluarga. Selain dinilai sangat luhur, [ini] juga dapat [berakibat] negatif ketika hal itu membuka peluang kepada orang-orang luar untuk menyebarkan paham radikal.... [ketika] banyak

stactible/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2016.html (diakses 10 Januari 2019).

¹² Status kesultanan Bima dihapus oleh pemerintah Republik Indonesia pada 1958 dan itu sendiri masuk menjadi bagian dari NTB. Sultan terakhir kesultanan Bima adalah Sultan Muhammad Salahuddin (bertahta pada 1920-1943), yang namanya diabadikan menjadi nama bandar udara di Bima sekarang. Pada 2001, gelar Sultan Bima kembali dianugerahkan kepada keluarga kerajaan Bima, walaupun kerajaan itu sendiri tidak memiliki kekuasaan politik.

¹³ *Basmalah* adalah sebutan singkat untuk kalimat yang lebih lengkap, “*Bism-i Llah-ir Rahman-ir Rahim*,” yang artinya “Dengan [menyebut] nama Allah yang Mahapengasih dan Mahapenyayang.” Kalimat ini adalah doa yang biasa diucapkan seorang Muslim ketika akan memulai satu pekerjaan.

¹⁴ Wawancara dengan Sudirman Makka, 11 Desember 2018.

orang yang masuk dan memberikan [ajaran] yang salah. [Karena itu] menjadi tidak ada filter [menyaring orang luar] dan menganggap [orang-orang luar] sudah menjadi kerabat atau bagian dari komunitas sendiri sehingga harus dilindungi. [Kondisi] ini juga yang menyebabkan banyak pelaku teror bersembunyi di Bima sehingga orang Poso atau Solo betah bersembunyi di sini. Budaya seperti ini yang sulit dihilangkan.¹⁵

Akhirnya, penjelasan menarik lain yang diberikan beberapa narasumber adalah tingginya rasa percaya diri dan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan diri orang-orang Bima, yang tumbuh dari keyakinan bahwa derajat manusia pada dasarnya setara satu sama lain. Dalam maknanya yang bisa positif atau negatif, hal ini bisa diterjemahkan atau berkembang ke dalam sikap “cuek” dan acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan seseorang sejauh hal itu tidak mengganggu orang-orang lainnya. Ketika ditanya bagaimana sikapnya terhadap kelompok-kelompok radikal di Penatoi, seorang narasumber menjawab, “Ya, memang mereka begitu, tertutup, sangat lain dari yang di luarnya. Tetapi memang apa salahnya? Toh [bukankah] mereka tidak mengganggu orang-orang lain? Tidak menyusahkan orang lain?”

Dalam arah lainnya, pembawaan di atas bisa berkembang menjadi sikap yang kurang menghargai otoritas dan tumbuhnya semacam anarki. Beberapa narasumber menyebutkan sulitnya menemukan seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat di Bima yang betul-betul didengar oleh semua pihak. Selain itu, Bima juga terkenal karena seringnya otoritas polisi atau pemerintah dilecehkan warganegara secara berjamaah. Dalam satu peristiwa yang menghebohkan pada Kamis, 26 Januari 2012, misalnya, ribuan orang warga Bima membakar hingga ludes kantor Bupati Bima. Hal ini dilakukan sebagai unjuk kemarahan massa terhadap sikap bupati yang menolak mencabut surat izin eksplorasi emas di wilayah tersebut, yang sebelumnya ditentang warga karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan menutup sumber mata air.¹⁶ Peristiwa ini sendiri merupakan kulminasi dari rangkaian panjang protes dan penanganannya oleh polisi yang sudah berjalan sebulan sebelumnya, yang memakan korban dan menjadi sorotan pemerintah pusat dan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM).¹⁷ Surat izin yang kontroversial di atas belakangan dicabut dan pembangunan kantor bupati baru selesai sepenuhnya pada pertengahan 2017.

Meski menarik, alasan-alasan di atas kurang bisa menjelaskan mengapa hanya orang-orang Bima tertentu yang memberi dukungan kepada atau terlibat dalam aksi-aksi ekstremis, sedang yang lainnya tidak. Artinya, alasan-alasan di tingkat makro, yang mengaitkan dukungan kepada atau keterlibatan dalam kekerasan ekstremis dengan sifat-sifat orang Bima, terlalu simplistis.

Alasan-alasan lain yang biasa diajukan adalah alasan-alasan yang lebih bersifat

¹⁵ Wawancara dengan Eka Iskandar Zulkarnain, 19 Oktober 2018.

¹⁶ Lihat “Kantor Bupati Bima NTB dibakar massa,” *BBC News Indonesia*, 26 Januari 2012, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120126_kantorbupatibimadibakar (diakses 11 Januari 2019).

¹⁷ Lihat “Komnas HAM: Polisi Melanggar HAM di Bima,” *Deutchwelle.com*, 26 Desember 2011, <https://www.dw.com/id/komnas-ham-polisi-melanggar-ham-di-bima/a-15627121> (diakses 27 Januari 2019).

struktural. Di sini para narasumber biasanya menyebutkan faktor tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Bima, laju pertumbuhan yang stagnan, ketimpangan ekonomi, sistem demokrasi yang rusak dan memperpanjang dominasi, dan lainnya. Semuanya ini merupakan faktor-faktor yang bisa mendorong orang-orang Bima untuk mendukung atau terlibat dalam aksi-aksi kekerasan.

Bima memang termasuk wilayah dengan tingkat pendapatan paling rendah di Indonesia. Menurut banyak narasumber, pemerintah pusat belum pernah menanamkan investasi dalam bentuk infrastruktur besar dan dapat mendorong kegiatan ekonomi menyeluruh di Bima. Sementara itu, di tingkat regional dan lokal, tidak ada koordinasi yang serius dan berjangka panjang dalam rangka memajukan program-program pembangunan.

Paradoksalnya, terlepas dari beratnya kehidupan ekonomi di Bima, banyak narasumber melaporkan bahwa bahkan keluarga-keluarga dengan tingkat pendapatan terendah sekalipun di Bima memberi perhatian besar kepada dan menanam investasi untuk pendidikan anak-anak mereka. Banyak cerita mengharukan di Bima tentang bagaimana para orangtua memotong anggaran biaya keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka terutama ke Malang, Surabaya, dan Makassar, yang relatif dekat dengan Bima, tetapi juga ke tempat-tempat yang lebih jauh seperti Yogyakarta dan Jakarta. Orangtua salah satu narasumber kami, seorang lulusan program master dari Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, berhasil menyekolahkan sebelas anak mereka ke perguruan tinggi, meskipun kepala keluarga itu hanya seorang guru.¹⁸ Karena alasan ini, tidak mengherankan jika jumlah lulusan perguruan tinggi di Bima cukup tinggi: Persentase penduduk dengan gelar sarjana di Kota Bima adalah 16,89% dan Kabupaten Bima 9,61%; persentase Kota Bima bahkan lebih tinggi dari persentase Mataram, ibukota provinsi (12,29%).¹⁹ Sayangnya, ketika para sarjana baru ini kembali ke Bima, hampir-hampir tidak ada pekerjaan untuk mereka dan sebagian besar mereka menganggur atau bekerja sebagai buruh paruh waktu yang tidak sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Menurut banyak narasumber, orang-orang Bima juga mengeluhkan terpinggirkannya mereka dari proses-proses pembuatan dan pengambilan kebijakan politik di tingkat provinsi, yang didominasi oleh para politisi Sasak di ibu kota Mataram, Lombok. “Tak seorang pun putra Bima yang pernah menduduki jabatan sebagai gubernur provinsi,” kata salah satu narasumber, menirukan kekecewaan umum warga Bima.

Sementara itu, di tingkat lokal, kebijakan politik banyak didominasi oleh keluarga-keluarga elite ekonomi-politik yang sama, yang mulai menumbuhkan tradisi politik dinasti di Bima. Di Kota Bima, sebelum diganti oleh yang bertugas sekarang, Qurais Abidin dan Abdul Rahman Abidin, Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018, adalah kakak-adik yang berasal dari keluarga politik yang berpengaruh. Sementara itu, di Kabupaten Bima, bupati yang sekarang bertugas (periode 2016-2021) adalah Indah Damayanti Putri, janda Ferry Zulkarnain, Bupati Bima yang sebelumnya (periode

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Sauki, 11 Desember 2018.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018,” <https://ntb.bps.go.id/publication/2018/12/28/fc0a50019a57818d4d65de54/statistik-kesejahteraan-rakyat-provinsi-nusa-tenggara-barat-2018.html> (diakses 10 Mei 2019).

2010-2015), yang wafat ketika masih bertugas dan kebetulan juga Sultan Bima. Waktu berkampanye untuk dipilih melanjutkan suaminya, Indah antara lain mengatakan: “Dengan [menyebut] Bismillah, saya maju sebagai calon Bupati Bima. Karena, masih banyak tugas dan tanggung jawab suami saya yang belum dituntaskan. Itulah salah satu [hal] yang memotivasi saya untuk maju sebagai calon Bupati Bima.”²⁰

Dengan kata lain, sistem demokrasi yang berjalan sekarang tidak banyak membantu peningkatan kesejahteraan warga Bima. Meskipun makin rutin dijalankan, hasil-hasil pemilu di Bima makin rentan dipengaruhi politik uang (*money politics*). Belakangan, menjelang Pemilu 2019, politik uang ini di Bima menggunakan “sistem paket”, yang menunjukkan makin canggihnya para makelar politik bekerja dan makin mahal biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk bisa dipilih sebagai pejabat publik.²¹ Maksudnya, dengan dana sebesar satu juta rupiah, misalnya, seorang calon pemilih bisa “dibeli” suaranya untuk memilih sekaligus lima nama yang sudah ditetapkan: (1) calon A untuk posisi presiden; (2) calon B untuk posisi DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah, tingkat nasional); (3) calon C untuk DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat, tingkat pusat); (4) calon D untuk DPRD I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tingkat provinsi); dan (5) calon E untuk DPRD II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tingkat kabupaten).²²

Berbagai perkembangan menyedihkan di atas mempersempit kesempatan bagi warga Bima yang biasa untuk melakukan mobilisasi vertikal. Banyak narasumber menyebut alasan-alasan di atas sebagai faktor-faktor kunci yang menyumbang kepada tingginya dukungan kepada atau keterlibatan warga Bima di dalam kasus-kasus kekerasan ekstremisme.

Akan tetapi seberapa adekuat penjelasan-penjelasan itu? Meskipun lagi-lagi sangat menarik, penjelasan-penjelasan struktural seperti ini, seperti juga penjelasan-penjelasan kultural, belum bisa secara memuaskan menerangkan mengapa hanya orang-orang tertentu saja di Bima yang mendukung paham-paham radikal atau terlibat di dalam kekerasan ekstremisme. Dengan kata lain, penjelasan-penjelasan ini juga terlalu menggeneralisasi. Alasan-alasan ini mungkin menjadi pendorong (*push factors*) dukungan dan keterlibatan di atas, tetapi mengapa hanya orang-orang Bima tertentu saja yang terdorong olehnya?

Selain itu, alasan-alasan di atas terutama fokus kepada orang-orang Bima yang menerima ajakan kepada ekstremisme dan kurang memperhatikan orang-orang atau jaringan di luar Bima yang menawarkan ajaran-ajaran tertentu yang mengandung ekstremisme kekerasan. Artinya, alasan-alasan di atas kurang mempertimbangkan kapasitas (kepemimpinan, kemampuan organisasi atau jaringan, sumber dana, dan lainnya), serta

²⁰ Lihat “Dinda, Istri Mendiang Sultan Bima Dilantik Jadi Bupati,” *Aktualita.info*, 17 Februari 2016, <http://www.aktualita.info/2016/02/dinda-istri-mendiang-sultan-bima.html> (diakses 5 Januari 2019).

²¹ Lihat “Politik Dinasti di NTB, Sembilan Orang dari Satu Keluarga Nyaleg,” *Media Indonesia*, 26 Juli 2018, <https://mediaindonesia.com/read/detail/174454-politik-dinasti-di-ntb-semilan-orang-dari-satu-keluarga-nyaleg> (diakses 22 Maret 2019).

²² Wawancara dengan Sauki, 11 Desember 2018. Hal ini dimungkinkan karena beberapa calon anggota legislatif di tingkat yang berbeda berasal dari keluarga besar yang sama, meskipun mereka mencalonkan diri lewat tiket-tiket yang disediakan oleh partai-partai yang berbeda. Misalnya, Qurais Abidin, Walikota Bima periode 2013-2018, dalam Pemilu 2019 mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPR Pusat, sementara anaknya untuk DPR Kota dan iparnya untuk DPR Provinsi.

komitmen (kegigihan dan dedikasi, atau kuatnya daya panggil ideologi) orang-orang atau kelompok-kelompok yang dengan sengaja hendak menanam atau menyebarkan ideologi ekstremisme kekerasan di Bima. Di atas sudah disebutkan bagaimana aktor-aktor seperti Abu Bakar Ba'asyir atau Aman Abdurrahman, yang jelas bukan orang Bima, begitu gigih mendakwahkan paham mereka. Di atas juga sudah dilaporkan, misalnya, bagaimana hubungan antara Aman Abdurrahman dan Iskandar sudah seperti guru dan murid. Dalam percakapan tentang terorisme di Indonesia, Bima sendiri antara lain dikenal sebagai salah satu dari segitiga "O" yang mengaitkan Poso, Solo, dan Mbojo (dengan Mbojo di sini merujuk ke Bima karena Mbojo adalah nama suku asli Bima).²³ Belum lagi jika dipertimbangkan faktor makin majunya teknologi komunikasi, sehingga kontak di antara satu dan lain orang atau jaringan bisa dilakukan lewat media sosial (lihat misalnya IPAC, 2018a & 2018b).

Terlepas dari diskusi di atas mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam berbagai penjelasan mengenai tumbuhnya terorisme di Bima, diperlukan studi yang lebih mendalam dan sistematis untuk menguji ketepatan empiris dari aneka penjelasan itu – dan laporan ini bukanlah tempatnya. Tetapi tersedianya beragam penjelasan di atas jelas mencerminkan pengakuan, baik diam-diam atau pun terbuka, bahwa terorisme memang merupakan masalah serius di Bima dan hal itu merupakan tantangan yang berat untuk diatasi.

4. Akar-akar Ekstremisme Kekerasan dalam Sejarah Bima

Sayangnya, selain ada faktor-faktor penarik dan pendorong orang-orang Bima untuk mendukung atau terlibat dalam kekerasan ekstremisme, akar-akarnya sendiri cukup tersedia dalam sejarah Bima (atau Indonesia) pascakolonial. Meskipun catatan-catatan yang ada berbeda pendapat mengenai beberapa detail, catatan-catatan itu, yang antara lain ditulis sejarawan dengan kredibilitas tinggi, bersepakat mengenai adanya atau bahkan kuatnya kaitan antara orang-orang Bima dengan ekstremisme kekerasan.

Salah satu peristiwa di mana akar-akar di atas bisa dilacak adalah peristiwa percobaan pembunuhan atas Sukarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Insiden ini terjadi pada 30 November 1957, ketika Presiden Sukarno mengunjungi pertunjukan malam di sekolah anaknya di Perguruan Cikini (Percik), Jakarta, dan sekelompok pemuda melemparkan granat ke arahnya dengan maksud membunuhnya. Sementara Presiden Sukarno sendiri selamat, 11 orang di sekitarnya tewas, sebagian besarnya anak-anak, dan kurang lebih 30 orang lainnya mengalami luka-luka berat (Kahin, 2010: 317).²⁴

Beberapa hari sesudah insiden di atas, pemerintah menangkap beberapa aktivis

²³ Wawancara dengan Mustafa, penyuluh agama di Kota Bima, 11 Desember 2018. Perumpamaan segitiga "O" ini mungkin tidak terlalu tepat karena terutama menempatkan Bima sebagai penyedia sumberdaya manusia (orang), sedang ideologi disumbangkan Solo dan tempat latihan militer disumbangkan Poso. Tetapi hal itu mencerminkan pentingnya Bima dalam jaringan terorisme di Indonesia.

²⁴ Sumber lainnya, sejarawan Peter Kasenda, menulis: "Jumlah korban ketika itu adalah tujuh orang meninggal dunia, 20 orang luka berat, dan 40 orang luka ringan. Para korban tersebut kebanyakan terdiri dari hampir semuanya murid dari Sekolah Dasar Cikini dan petugas-petugas alat negara yang mengawal Presiden" (2012: 161).

Gerakan Anti-Komunis (GAK) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI), yang berasal dari Bima dan tinggal di Asrama Sumbawa di Jl. Cikini (di sebelah Pasar Cikini, yang kini sudah dibongkar). Sejumlah granat tangan yang digunakan dalam insiden di atas dilaporkan berasal dari asrama itu (Leirissa, 1991: 174-175). Belakangan, April 1958, empat di antara aktivis di atas dibawa ke pengadilan: Jusuf Ismail dari Bima, Sa'adon bin Mohamad dari Sulawesi Selatan, Tasrif bin Hoesain dari Bima, dan Mohamad Tasim bin Abubakar dari Dompu, Sumbawa. Tiga yang pertama dijatuhi hukum mati pada 13 Agustus 1958, tetapi baru dieksekusi pada 28 Mei 1960 dan ketiganya tewas di hadapan regu tembak (Kahin, 2010: 318).

Mengenai kaitan antara GAK dan GPPI dengan Bima, sejarawan Audrey Kahin menulis: "Pemuda yang melakukan penyerangan adalah anggota Gerakan Anti-Komunis (GAK) Jakarta.... Beberapa orang anggotanya berasal dari daerah yang kuat pengaruh Islamnya, Bima dan Dompu (di Sumbawa) dan menginap di asrama dekat sekolah Cikini. Banyak juga yang berasal dari organisasi pemuda resmi Masjumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI)" (Kahin, 2010: 317).²⁵ Sementara itu, informasi lebih jauh mengenai Jusuf Ismail, yang tampak lebih senior dibanding yang lainnya, diberikan sejarawan Leirissa:

Jusuf Ismail adalah seorang pemuda Sumbawa yang fanatik menentang komunisme. Sebagai anggota GPPI dia sudah banyak mendapat propaganda mengenai masalah itu. *Tujuan gerakan itu adalah memaksa pemerintah mengubah haluan politik. Karena usaha-usaha legal ternyata tidak banyak berhasil, tindakan kekerasan menjadi alat yang dianggap ampuh.* Kebetulan banyak pula mantan pasukan DI/TII [Darul Islam/Tentara Islam Indonesia] yang berhasil menyusup ke dalam tubuh organisasi itu. Sejumlah penghuni asrama Sumbawa pun bekas pasukan tersebut dan tidak tertutup kemungkinan Jusuf Ismail pun demikian. (Leirissa, 1991:175; cetak miring ditambahkan)

Beberapa orang menyebut peristiwa percobaan pembunuhan Sukarno di atas sebagai insiden terorisme pertama di Indonesia, yang merujuk kepada penilaian Sukarno sendiri mengenainya.²⁶ Selain itu, eksekusi hukuman mati terhadap beberapa tertuduhnya juga disebut-sebut sebagai eksekusi mati pertama di negeri ini sesudah Indonesia merdeka (Kahin, 2010: 318). Dalam otobiografinya, Sukarno menyebutkan mengapa dia menyetujui

²⁵ Beberapa sejarawan menduga bahwa Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Negara, adalah otak di balik insiden di atas. Dia beberapa kali dicatat tidak sepeham dengan Presiden Sukarno, terutama karena presiden dianggap terlalu dekat dengan orang-orang komunis. Zulkifli Lubis adalah salah satu pembesar GAK dan belakangan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang oleh Sukarno dianggap sebagai pemberontak. Lebih jauh tentang ini, lihat Kahin (2010: 318) dan Kasenda (2012: 161-163).

²⁶ Dalam otobiografinya, Sukarno menyatakan: "Darul Islam adalah kelompok teroris kanan berhaluan agama yang picik, keras, fanatik, yang menuntut Negara Islam sejak tahun 1948. Di tahun '50-an Kartusuwiryo melontarkan api dengan ucapannya, 'Bunuh Sukarno. Dialah penghalang pembentukan Negara Islam. ... Sukarno menyatakan bahwa Indonesia harus berdasarkan Pancasila, bukan Islam. Sebagai jawaban atas tantangan ini kita harus MEMBUNUH SUKARNO!'" (Dikutip dalam Adams, 2007: 328; cetak kapital sesuai aslinya.)

hukuman mati itu, seperti juga hukuman mati kepada Kartosuwiryo, pemimpin DI/TII.²⁷ Katanya:

Aku memikirkan korban-korban yang tidak berdosa yang telah dikuburkan di dalam tanah. Aku memikirkan sembilan anak-anak dan seorang perempuan hamil yang kulihat sendiri tersungkur tidak bernyawa di kakiku. Karena seorang fanatik yang ingin membunuhku, banyak yang harus kehilangan nyawanya. Dan karena itu aku membubuhkan tanda tangan menghukum mati Kartosuwiryo. ... Ini bukan suatu tindakan untuk memenuhi kepuasan hati. Itu tindakan untuk menegakkan keadilan. (Dikutip dalam Adams, 2007: 329-330)

Paparan di atas mengingatkan kita akan pernyataan beberapa narasumber yang sudah dikutip mengenai kentalnya keislaman orang-orang Bima, kesiapan mereka bahkan untuk mati dalam membela Islam (dari yang dianggap musuh-musuhnya seperti komunisme), dan mungkin juga terbatasnya informasi yang mereka miliki dan mudahnya mereka untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok lain. Karena alasan terakhir, mereka bisa jadi “menari di atas gendang orang lain.”

Pada era yang lebih belakangan, catatan terkait hubungan Bima dan kekerasan terorisme muncul lewat nama Abdul Qadir Baraja: Tokoh DI kelahiran Sumbawa ini menulis buku *Hijrah dan Jihad*, yang menjadi buku rujukan di beberapa kalangan DI; pada akhir 1970-an membantu Abu Bakar Ba'asyir mengajar di Pesantren Ngruki; terlibat dalam Peristiwa Komando Jihad pada akhir 1970-an; dan ditangkap serta divonis bersalah karena menyediakan bahan peledak untuk aksi pengeboman Candi Borobudur pada Januari 1985 (Solahudin, 2013: 87-90, 120). Belakangan, dia mendirikan organisasi Khilafatul Muslimin, yang terus aktif di Sumbawa dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga sekarang. Tentang perkembangan baru ini, satu laporan menulis: “Hal tersebut mungkin justru merupakan perkembangan yang positif, karena tidak ada indikasi bahwa Khilafatul Muslimin sendiri terlibat aksi kekerasan, apa pun masa lalu Baraja” (ICG, 2005: 10).

III. LINGKUNGAN RADIKAL: KAMPUNG, DAN DINAMIKA ANTAR-KELOMPOK

Seperti dipaparkan sebelumnya, kalangan yang sepaham dan mendukung kekerasan kelompok ekstrem hanya sebagian kecil saja dari masyarakat pada umumnya. Masyarakat umumnya tidak mendukung atau setidaknya bersikap ambigu terhadap keberadaan kelompok ekstremis. Karena itu, kita perlu melihat lebih jauh di luar penjelasan kultural dan struktural yang cenderung statis dan abstrak dalam menjelaskan perkembangan kelompok ekstremis kekerasan.

Pada bagian ini, kami berusaha mengarahkan perhatian pada sebagian kelompok tersebut, terutama dengan mengamati hubungan antara kelompok ekstremis dengan lingkungan terdekat di mana mereka muncul dan terhubung secara sosial dan simbolis.

²⁷ Khusus tentang hubungan antara terorisme di Indonesia dan DI/TII sebagai sumber ideologisnya di sini, lihat penjelasan detailnya dalam Solahudin (2013: 39-45).

Termasuk di dalam kelompok radikal ini beberapa perempuan mujahidat, yang terlibat dalam kekerasan ekstremisme atau terkait dengannya sebagai istri atau janda jihadis.

1. Kelurahan Penatoi sebagai Kantong Radikal

Pada bagian-bagian yang lalu sudah beberapa kali disinggung soal kelompok radikal di Kelurahan Penatoi. Informasi dan gambaran lebih dalam mengenainya pasti akan berguna. Paparan di bawah disusun berdasarkan wawancara dengan sejumlah narasumber yang namanya tidak disebutkan, liputan media massa, dan observasi kami sendiri.

Terletak di Kecamatan Mpunda, di jantung Kota Bima dan berjarak hanya sekitar setengah kilometer dari kantor walikota, kelurahan ini adalah yang tertua di situ dan disebut-sebut menjadi lokasi pemukiman elite lama di mana keluarga para pembesar ekonomi dan politik Bima berdiam hingga sekarang. Ada masjid dan infrastruktur kesalehan lainnya di sana, tetapi lingkungan itu juga disibukkan oleh kebiasaan bermaksiat seperti adu ayam dan konsumsi minuman keras, bahkan narkoba, juga hingga sekarang.

Menurut beberapa narasumber, sejak sekitar tiga dekade lalu, kelurahan ini konon mulai dimasuki kelompok yang oleh pemerintah disebut Igaras di atas, yang jumlahnya terus meningkat, sebagian untuk tujuan menyembunyikan diri. Pihak-pihak di Pemda, Kemenag, Polres, atau pun Kodim tidak memiliki informasi yang pasti dan sama mengenai siapa kelompok Igaras yang sering mereka rujuk itu. Tidak juga ada angka pasti mengenai jumlah mereka, tetapi beberapa narasumber menyebut 50 hingga 60 kepala keluarga, beberapa di antara mereka terhubung sebagai keluarga dan sanak famili. Kini mereka dilaporkan “menguasai” tujuh dari duabelas rukun tetangga di wilayah amat sempit itu.

Diduga ada beberapa kelompok Igaras di situ, tetapi yang belakangan berpandangan paling ekstrem adalah kelompok Tauhid Wal Jihad (TWJ), yang berbaiat ke Aman Abdurrahman dan men-*thaghut*-kan orang lain. Para narasumber kami tidak bisa memastikan hubungan di antara kelompok yang disebut terakhir ini dengan JAD atau JAT, tetapi mereka sama-sama bersepakat bahwa dua ustaz paling berpengaruh di sini adalah Ustaz Lahmudin dan Ustaz Muhammad bin Zedon (biasa dipanggil Ustaz Zedon) yang berafiliasi dengan dua kelompok yang disebut terakhir.

Sejak sekitar sepuluh tahun terakhir, mereka juga dilaporkan mulai “menguasai” Masjid Istiqomah, yang terbesar di situ dan sebenarnya dibangun oleh Pemda. Mereka juga yang belakangan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi imam salat atau berceramah di sana. Sejak dikelola oleh mereka, masyarakat di luar mereka mulai enggan datang dan salat di masjid itu; alih-alih dari itu, mereka malah membangun masjid alternatif, yang diberi nama Masjid Al-Ansar dan terletak di samping Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 di Kota Bima.

Kelompok-kelompok di atas juga menyatakan dukungan kepada aksi-aksi terorisme di tempat lain secara terbuka. Satu narasumber menyebutkan bahwa ketika ISIS mendeklarasikan diri pada Oktober 2014, tempat pertama di Indonesia di mana bendera ISIS dikibarkan adalah di Penatoi ini. Selain itu, seperti dilaporkan *Tempo*, di Masjid Istiqomah yang terletak di sini pulalah ratusan warga Bima, termasuk anak-anak, berbaiat

ke ISIS setelah salat Jumat, 20 Juli 2014.²⁸

Lebih jauh, kelompok-kelompok di atas bahkan berani menentang pemerintah secara terbuka. Pada Maret 2017, misalnya, beberapa unsur dari mereka tanpa ragu menolak rencana lurah setempat untuk melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di halaman masjid. Alasannya, beberapa unsur dari acara itu – nyanyian, musik, kasidah, dan mars MTQ – haram hukumnya dalam Islam. Acara itu baru bisa terselenggarakan ketika tuntutan itu diakomodasi.²⁹

Selama lima tahun terakhir, konon pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sudah mulai berusaha untuk menguasai kembali pengelolaan Masjid Istiqomah. Kementerian Agama dan MUI bahkan sempat mengirimkan imam-imam ke masjid di atas untuk berdialog dengan mereka. Merasa tidak nyaman karena alasan-alasan ini, kelompok Igaras di atas belakangan mulai memindahkan pusat kegiatan mereka ke satu lokasi baru yang sedang dibangun dan di siang hari biasa digunakan sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Sebagian narasumber menyebut lokasi baru itu Pesantren Abu Bakar Ashshiddiq. Di sinilah Ustadz Zedon memimpin pengajian pada tiap Rabu malam, dengan peserta sekitar 100 orang yang umumnya terdiri dari orang-orang setempat, tetapi ada juga yang datang dari luar Kelurahan Penatoi, bahkan dari Sumbawa dan Dompu.

Di luar pengajian di atas, dakwah dan penyebaran ajaran kelompok Igaras di atas dilakukan secara diam-diam dan melalui hubungan orang per orang. Beberapa orang yang berhasil diajak masuk ke dalam kelompok mereka, atau “direkrut”, adalah para pelaku tindakan-tindakan kriminal seperti pemabuk, pencuri, atau bahkan preman, yang sedang membutuhkan bantuan atau pekerjaan. Kata seorang narasumber:

Masyarakat merasa tidak ada masalah karena ormas [kelompok radikal] ini dapat mengajak anak-anak muda berhenti mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan lain-lain. Masyarakat menganggap, selama masih melalukan salat, maka [hal] itu [masih] dibenarkan, tidak ada masalah. Mereka [yang direkrut] menjadi “alim”, itu diapresiasi oleh masyarakat. Inilah awal atau pintu pembuka masuknya paham-paham radikal, di samping juga melalui dakwah. Faktor ekonomi juga menjadikan mereka dekat atau mengikuti kelompok tersebut. Seperti halnya mereka tidak memiliki pekerjaan, [maka mereka akan] dibantu oleh kelompok atau ormas tersebut.... Pasti saja [dalam proses itu] akan diberikan doktrin mengenai pemahaman berbeda terhadap negara ini dengan cara memerangi negara atau orang-orang kafir.

Bagaimana kelompok-kelompok di atas menghidupi diri? Beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka berdagang apa saja, dari bahan-bahan makanan seperti tempe

²⁸ Lihat liputan *Tempo* di sini: “Ratusan Warga Bima Dibaiat Dukung ISIS,” *Tempo.co*, 9 Agustus 2014, <https://nasional.tempo.co/read/598385/ratusan-warga-bima-dibaiat-dukung-isis/full&view=ok> (diakses 9 Januari 2019).

²⁹ Lihat “Ditentang Jamaah Masjid Istiqomah, MTQ Penatoi Tetap Berjalan,” *Kahaba.net*, 27 Maret 2017, <https://kahaba.net/berita-bima/42489/ditentang-jamaah-masjid-istiqomah-mtq-penatoi-tetap-berjalan.html> (diakses 12 Januari 2019).

atau tahu, yang mengisi pasar-pasar di Bima atau di pinggir-pinggir jalan, hingga hasil kerajinan tangan. Selain itu, pemimpin mereka disebut-sebut menjalankan bisnis bahan-bahan bangunan. Beberapa narasumber kami memuji etos kerja orang-orang tersebut yang mengagumkan: Tahan banting, mau kerja apa saja, hemat, dengan solidaritas tinggi. Seorang mitra lokal kami bahkan memercayakan pemasangan listrik di rumahnya, yang sedang dibangun, kepada beberapa orang dari kelompok itu. Menurutnya, selain ongkos pemasangannya relatif murah dibanding harga pasar, mereka kerja tepat waktu, dan layanan pascapemasangannya memuaskan.³⁰

Memasuki wilayah khusus di tujuh RT di kelurahan itu, kita seperti masuk ke dalam kantong dunia yang lain, yang sangat kontras dari yang di luarnya. Jalan-jalannya yang umumnya sempit, tidak bisa dilewati mobil, memisahkan satu dan lain rumah yang rata-rata berukuran kecil dan amat sederhana beratap seng. Kata dua narasumber kami, di situ antara lain tinggal tujuh orang janda yang suami mereka “dibunuh Densus 88” (begitu narasi yang berkembang) dan beban hidup mereka ditanggung bersama. Satu narasumber kami yang tinggal di Penatoi dan menjadi bagian dari komunitas itu menyatakan: “Mereka kami tampung karena keluarga dan masyarakat tidak menerima mereka. Masyarakat menganggap bahwa mereka bersalah sebagai istri teroris.”

Di lingkungan itu kita umumnya bertatap muka dengan kaum laki-laki, tua maupun muda, bahkan anak-anak, yang penampilannya khas: rambutnya dibiarkan panjang, berjenggot, berbaju gamis dengan celana panjang yang potongan bawahnya menggantung di atas mata kaki, dan bertopi bulat – “Seperti orang-orang Afghanistan,” kata seorang mitra lokal kami. Mereka, kaum laki-laki itu, memanggil dan dipanggil kawannya dengan sebutan “ikhwan” (dari Bahasa Arab yang artinya saudara), seperti di Poso, wilayah pascakonflik di Sulawesi Tengah, meskipun jelas Penatoi atau Bima bukanlah wilayah pascakonflik seperti itu.³¹ Jika kita berkendara sepeda motor di sana dan sempat bertemu atau melihat perempuan, biasanya sedang menjemur pakaian atau memasak, dia atau mereka umumnya berhijab Syar’i yang berukuran besar atau bahkan bercadar.

Tiap orang luar yang masuk ke wilayah itu pasti merasa sedang diperhatikan, karena sorotan mata akan tertuju kepadanya. Kata seorang narasumber, “Setiap melewati kampung itu, kita akan dicurigai sebagai mata-mata.” Itu juga yang kami rasakan ketika kami mengelilingi kampung ini, dengan berjalan kaki atau mengendarai motor atau mobil, sendiri atau bersama, sambil menyempatkan diri ikut Salat Jumat di Masjid Istiqomah. Keluar dari wilayah itu, selain terbebas dari perasaan tertekan karena sorotan mata yang mencurigai, kami juga diam-diam mengagumi daya tahan dan solidaritas mereka.

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Sauki, 11 Desember 2018.

³¹ Di Poso, “ikhwan” adalah sebutan yang biasa digunakan untuk merujuk kepada anak-anak muda yang aktif terlibat sebagai bagian dari milisi Muslim ketika konflik komunal berlangsung di sana pada 1998. Sebutan lain yang terkait dengannya adalah “jihadis”, yang khusus digunakan untuk menunjuk mereka yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan, yang mereka anggap bagian dari *jihad* (perang suci), meskipun dengan tingkat keterlibatan beragam. Di Bima, sebutan “jihadis” juga digunakan dalam makna yang sama, bergantian dengan “mujahid”.

2. Contoh Kasus: Penolakan atas Pemilu di Kantong Penatoi

Di atas kami sudah melaporkan adanya kecenderungan orang-orang di Bima untuk bersikap dan bertindak anarkis, dengan akibat antara lain melawan pemerintah, pada saat-saat tertentu. Lebih jauh, di kantong tertentu di Kelurahan Penatoi yang mendukung atau terlibat dalam ekstremisme kekerasan, sikap dan tindakan itu ditopang oleh keyakinan mereka bahwa aturan-aturan pemerintah tidak perlu ditaati, bahkan wajib ditolak, karena aturan-aturan itu bukan ketentuan Allah tetapi buatan manusia (*thaghut*).

Butir ini dinyatakan oleh banyak narasumber, baik dari kalangan aparat keamanan, pemerintahan daerah, atau pemimpin masyarakat sipil. Seorang narasumber yang memantau dari dekat aktivitas para ikhwan di Penatoi, misalnya, bercerita mengenai laporan anak buahnya tentang isi satu khotbah Jumat yang diikutinya pada awal Februari 2019. Laporan itu berbunyi demikian:

Jumatan [Salat Jumat] hari ini sebagai imamnya ... dan khatibnya ... orang ... [Isi khotbahnya] Sebagai umat Islam kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah [harus kuat] dengan selalu menjalani perintah serta menjauhi larangan-Nya.... Agar selalu berupaya menjauhi larangan Allah dan men-*tauhid*-kan Allah dan [bersikap] *kufir* [mengingkari, menentang] terhadap *thaghut*. Bukti nyata *thaghut* antara lain [adalah] adanya hukum buatan manusia. Membanding-bandingkan hukum Allah dapat menyebabkan kita jatuh pada kesyirikan [menyekutukan Allah].... Tanpa kita sadari, yang membuat hukum maupun yang tetap menjalankan hukum buatan manusia itu sama saja mengarah kepada kemusyrikan.

Karena alasan di atas, mereka juga kadang melawan aturan-aturan polisi, termasuk dalam urusan lalu lintas. Seorang polisi melaporkan:

Ketika anggota kami lagi [sedang] mengatur lalu lintas, mereka *enggak* mau diatur dan melawan. Dia bilang mau *pake* [gunakan] aturan Tuhan. Anggota [kami] agak kaget juga, tetapi ya sudah. Habis itu dia kabur begitu saja. Tidak dikejar dan tidak ditangkap.... Tetapi di kejadian kedua kita tahan motornya dan kita kasih [surat] tilang. Mereka kita kasih tilang [dan] kalau [motornya] mau keluar harus ada STNK dan SIM. Akhirnya mereka [datang ke Polres Bima], didampingi oleh Ustad [...] dan Ustad [...]. Mereka ditanya, “Mengapa ditilang?” Mereka sendiri [menjawab], “Tidak pakai helm, tidak bawa SIM dan STNK, Pak.” Alhamdulillah [STNK] motor itu masih dalam keadaan pajak hidup. Ya, sudah, kalau begitu mana SIM dan STNK-nya? Tetap kita tilang dan memang nanti kita kembalikan tetapi kita kasih tindakan tegas.³²

³² Wawancara dengan Ananda, Kasat Intel Polres Kota Bima, 11 Februari 2019. Dua ustaz yang namanya disebut narasumber, yang kami samarkan di sini, adalah tokoh masyarakat yang dikenal luas di Bima, yang tampaknya biasa membantu para ikhwan jika berurusan dengan polisi atau aparat keamanan.

Sehubungan dengan butir di atas, penting dilaporkan di sini dugaan banyak narasumber bahwa kelompok-kelompok di atas juga menolak demokrasi, seperti tercermin dalam penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun tidak bisa dipastikan, dugaan itu didukung penghitungan lebih jauh tingkat partisipasi dalam Pilkada 2018 menurut kelurahan di Kecamatan Mpunda, di mana Kelurahan Penatoi berada. Hasil penghitungan ini menunjukkan, meskipun angkanya sangat tinggi (80%), tingkat partisipasi di Kelurahan Penatoi adalah yang terendah dibanding kelurahan-kelurahan lainnya: Lewirato (85,2%), Mande (87,6%), Manggemaci (88,6%), Matakando (89,4%), Manggonao (83,1%), Panggi (86,6%), Sadia (85,7%), Sambine (91,1%), dan Santi (88,2%).³³

Dugaan di atas diperkuat keterangan salah seorang Ketua Bawaslu setempat, yang melaporkan bahwa di Kelurahan Penatoi ada sekelompok orang, jumlahnya sekitar 60-an, yang tidak mau didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pilkada 2018. Ketika diadakan pencocokan dan penelitian (“coklit”) dokumen, yang dilakukan *door-to-door* oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), mereka berhasil ditemui, tapi tetap tidak mau ikut pemilu. “Mereka punya KTP, tetapi tetap memilih tidak mau [ikut pemilu]. Namanya tetap ada di DPT, tetapi mereka tidak mau mencoblos.... Kita tidak bisa memaksa mereka juga,” katanya.³⁴

Pada titik ini menarik untuk membandingkan sikap para ikhwan di Bima dan Poso terkait pemilu. Ada tiga butir perbandingan yang penting dicatat di sini (lihat Ali-Fauzi, Rafsadie, dan Mulyartono, 2019). Pertama, sementara para ikhwan di Poso mulai mendukung pemilu meskipun sebelumnya mereka memandangnya *thoghut*, di Bima mereka tetap saja tidak mau berpartisipasi. Hal ini berbanding terbalik dengan dukungan kepada kelompok teroris MIT di Poso dan Bima: Sementara dukungan kepada kelompok itu, yang didirikan dan beroperasi di Poso, merosot tajam di Poso sendiri, dukungan kepadanya justru belakangan menguat di Bima. Artinya, dukungan kepada kelompok MIT di Bima berbanding lurus dengan penolakan mereka terhadap pemilu.

Kedua, jika di Poso pascakonflik penolakan atas pemilu dilakukan cukup banyak orang (tetapi jumlahnya terus menurun), di Bima hal itu dilakukan hanya segelintir orang. Hal ini terkait dengan asal-usul dukungan kepada terorisme di Poso dan Bima. Di Poso, dukungan ke arah itu sudah disediakan oleh banyak ikhwan yang sudah teradikalisasi akibat konflik komunal Muslim-Kristen (1998), yang belakangan mengalami radikalisasi lebih jauh lewat indoktrinasi jaringan JI. Belakangan, dengan makin amannya Poso dan tumbuhnya kekecewaan kepada jaringan JI dan MIT pimpinan Santoso, dukungan itu pun merosot. Berbeda dari perkembangan di Poso ini, mereka yang mendukung aksi-aksi terorisme di Bima belakangan ini adalah segelintir orang yang memang didorong oleh penolakan ideologis atas demokrasi sebagai sistem *thaghut*.³⁵

³³ Lihat laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Hitung Cepat: Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat,” https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/nusa_tenggara_barat/kota_bima/mpunda (diakses 10 Maret 2019).

³⁴ Wawancara dengan Asrul Sani, Ketua Bawaslu Kota Bima, 13 Februari 2019.

³⁵ Seorang narasumber dari FUI dan JAS menyampaikan bahwa ada pergeseran pandangan di sebagian kalangan di JAS dan Taawun. Sekarang mereka lebih berhati-hati dan tidak mengharamkan memilih.

Akhirnya, ketiga, kedua butir di atas dimungkinkan karena sementara Poso adalah wilayah pascakonflik, Bima bukan wilayah seperti itu. Di Poso, banyak orang, termasuk ikhwan dan mantan jihadis, mendukung Pemilu 2019 karena mereka sudah pernah merasakan akibat buruk konflik kekerasan di masa lalu. Insentif lainnya datang dari fakta bahwa konflik kekerasan yang terjadi di Poso adalah konflik komunal antara Muslim dan Kristen, dengan jumlah yang kurang-lebih seimbang, dan mereka tak mau mengulanginya.

Butir ini harus menjadi pelajaran penting dari Poso untuk Bima. Masyarakat Bima perlu lebih waswas kepada kelompok ekstremis *justru* karena masyarakat Poso mulai mengasingkan kelompok sejenis, yang diwakili misalnya oleh kelompok MIT, menolak cara lama mereka memperjuangkan kepentingan, dan memilih untuk mendukung pemilu.

3. Sedikit tentang “Mujahidat”: Perempuan di Lingkungan Radikal

Di atas kami sudah melaporkan banyak segi perkembangan ekstremisme kekerasan di Bima yang melibatkan kelompok laki-laki. Di bawah ini adalah laporan tentang para “mujahidat”,³⁶ beberapa perempuan di lingkungan radikal di Bima, yang juga memiliki posisi istimewa dan terkait dengan kelompok teror.

Catatan menonjol pertama adalah bahwa keterlibatan mereka diawali oleh perkawinan mereka dengan anggota-anggota kelompok teror. Tidak begitu jelas apakah mereka tahu detail mengenai (calon) suami mereka sebelum mereka menikah. Juga tidak begitu jelas apakah mereka tahu bahwa perkawinan mereka akan memperkuat hubungan di antara satu dan lain jaringan teror.

Faktanya adalah tiga perempuan Bima menikah dengan tiga pimpinan MIT di Poso, yaitu: Santoso, yang menikah dengan Jumiatus alias Umi Delima; Ali Kalora, yang menikah dengan Tini Susanti Kaduku alias Umi Fadel; dan Basri, yang menikah dengan Nurmi Usman alias Umi Norma atau Oma. Sesudah menikah dengan tiga petinggi MIT Poso itu, ketiga perempuan Bima ini menyertai suami mereka bergerilya di Gunung Biru, Poso, sejak 2014, mengikuti pelatihan militer yang diadakan di sana, hingga mereka tertangkap pada 2016 (IPAC, 2017a: 14).

Ketika ketiga mujahidat itu ditangkap, kondisi mereka berbeda-beda. Ketika diadili dan dipenjara, durasi hukuman mereka pun berbeda. Masalah berikutnya yang penting adalah apa yang para perempuan ini akan lakukan nanti sesudah keluar dari penjara.

Ketika Umi Delima ditangkap, suaminya Santoso sudah terbunuh, meninggalkan anak hasil perkawinan mereka tinggal bersama pamannya di Poso. Pada Desember 2018,

Kami menduga perkembangan yang terjadi di Pilkada Jakarta dan pemilihan presiden, misalnya, membuat mereka merasa penting merebut ruang itu dan lebih melihat demokrasi tidak dari sudut pandang akidah, tetapi dari manfaat dan mudaratnya.

³⁶ Kata *mujahidat* dipinjam dari Farhana Qazi (2011) dan diambil dari Bahasa Arab yang artinya “para pejuang perempuan” atau “para jihadis perempuan”. Kami mengadopsinya di sini, mengikuti bagaimana para perempuan itu disebut di lingkungan mereka. Dalam artikel Qazi, kata itu ditulis sesuai bunyinya, *mujahidaat* (dengan dua “a” dan “t” di akhir), menandakan bahwa kata itu adalah bentuk plural dari kata *mujahidah* (bentuk penyebutan jenis kelamin perempuan tunggal bagi kata *mujahid*). Transliterasi standar untuk kata itu adalah *mujâhidât*, tetapi kami di sini menggunakan sistem yang biasa saja dan menggunakan “mujahidat” (tidak dicetak miring).

begitu selesai menjalani hukuman 27 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, Umi Delima langsung dijemput utusan Korem 162/Wira Bhakti dan dibawa pulang ke kampung halamannya di Bima. Keinginan Umi Delima untuk langsung pulang ke Poso, menengok anaknya, dicegah hingga suasana kondusif sesudah Pemilu 2019. Untuk itu, Umi Delima sudah disediakan toko di kampung halamannya di Bima untuk memulai berwirausaha. Kata wakil Korem 162/Wira Bhakti ketika meresmikan toko itu: “Kami upayakan [Umi Delima] pulang ke Bima, supaya tidak pulang ke Poso. Kalau pulang ke Poso ‘kan nanti jadi teroris lagi.”³⁷

Sementara itu, Oma ditangkap bersama dengan suaminya, Basri, dalam keadaan hidup, pada September 2016.³⁸ Sedang Umi Fadel ditangkap pada Oktober 2016 berada dalam kondisi hamil delapan bulan dan segera dilarikan ke rumah sakit.³⁹ Keduanya berharap mendapatkan masa tahanan yang sama dengan Umi Delima, tetapi, sayangnya, mereka divonis tiga tahun penjara. Diperkirakan tahun ini mereka akan menyelesaikan masa tahanan mereka.

Jalur pernikahan sebagai pengikat hubungan di antara kelompok-kelompok teror juga dilakukan oleh kelompok Bima dengan jaringan JAT di Aceh dan Medan. Ini terjadi pada Kamaluddin, seorang jihadis yang berafiliasi dengan JAT dari Aceh yang sempat mendapat suaka di Bima dari Mei hingga Desember 2010 melalui Uqbah. Ketika di Bima, dia mengambil istri seorang Bima (ICG, 2012: 20). Dalam arah lain, seorang perempuan dari Medan bernama Ziro bertemu dengan seorang jihadis dari Bima. Mereka menikah di Semarang dan sejak 2015 pindah ke Bima dan menetap di sana (Nuraniyah, 2019: 9).

Para perempuan di atas menyadari semua aktivitasnya berkaitan dengan aksi teroris, bahkan ikut dalam pertempuran dengan polisi (IPAC, 2017a: 14). Tiga hal memotivasi mereka untuk ikut pelatihan, yakni: mengikuti nasihat suami, melindungi diri jika diserang kepolisian, dan membantu kelompoknya melawan kelompok kafir yang menghalangi implementasi hukum Islam di Indonesia. Pandangan negatif mereka akan polisi dan pemerintahan tidak hanya datang dari ajaran yang disebarkan Aman Abdurrahman, tetapi juga kabar yang beredar tentang perlakuan polisi terhadap suami atau saudara mereka.

Ini dialami misalnya oleh Umi Fathanah (bukan nama sebenarnya), istri Annas, jihadis yang ditembak mati usai salat subuh di Dompu, Kabupaten Bima, pada 2013. Dia memerlukan waktu satu bulan untuk memulangkan jasad suaminya yang dibawa kepolisian ke Jakarta. Ketika tiba, kondisi jenazah sudah kaku: “Darah dan jenazahnya wangi, padahal dia ... pelurunya banyak, dadanya dibelah, *kayak* [seperti]-nya diambil organnya. Matanya dijual *kayak*-nya. Matanya diganti *pake* [dengan] bola mata boneka, karena warnanya biru dan hanya sebelah. Badannya juga *enggak* ada isinya, diganti *pake*

³⁷ Lihat “Korem 162/WB Pulangkan Istri Santoso ke Bima untuk Deradikalisasi,” *Detik.com*, 17 Maret 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4471208/korem-162wb-pulangkan-istri-santoso-ke-bima-untuk-deradikalisasi> (diakses 10 Mei 2019).

³⁸ Lihat “Satgas Tinombala Juga Tangkap Istri Teroris Poso Basri,” *CNN Indonesia*, 14 September 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160914205905-12-158336/satgas-tinombala-juga-tangkap-istri-teroris-poso-basri> (diakses 10 Mei 2019).

³⁹ Lihat “Istri Diambil dari Hutan, Ali Kalora Terus Saja Melawan,” *Detik.com*, 1 Januari 2019, <https://news.detik.com/berita/4366791/istri-diambil-dari-hutan-ali-kalora-terus-saja-melawan> (diakses 10 Mei 2019).

[dengan] papan, [di] dadanya ada [tanda] bekas sepatu.”⁴⁰

Kemarahan mendalam terbersit di mata Umi Fathanah. Dia berharap kematian suaminya akan dibalas di akhirat atau melalui anak-anaknya yang saat ini berusia sepuluh dan sebelas tahun. Katanya: “Bagaimana [pun] ini ‘kan bukan hukum Allah yang ditegakkan. Ini ‘kan undang-undang yang berlaku ‘kan.... Nanti biar dikasih tahu siapa yang bunuh *abi* [ayah]-nya. Biar dicari orangnya. Anaknya yang pertama sampai ketiga laki-laki semua. Insya Allah jadi mujahidin semua.”⁴¹

Narasi penyiksaan seperti tergambar di atas juga mempengaruhi perempuan-perempuan lain. Umi Nurmila dan Umi Siti (bukan nama sebenarnya), dua janda jihadis yang mati di Suriah pada 2015, tidak menyesali keputusan suami mereka untuk mati di tanah Syam itu. Kata Umi Siti:

Kadang saya pikir mendingan *abi* [ayah]-nya pergi jauh ke sana [Suriah dan daerah konflik lainnya]. Soalnya kalau di sini [Indonesia], disiksa. Kadang mereka [polisi] *enggak* mau tahu, padahal [dia sedang] pergi salat saja di masjid. Memang orang-orang yang bertauhid ada saja tantangannya. Sampai ada yang hilang ingatan.... Sampai ada yang mati di dalam, keluarnya [sudah jadi] mayat. Pemerintah diam saja, bungkam ‘kan? Ada orang Bima juga, masuk [penjara] sehat, keluar [sudah jadi] mayat. *Enggak* ada kabar ke mana, [kepada] istri juga. Katanya dia kena sakit maag, berarti mereka [polisi] *enggak* kasih makan.⁴²

Kebencian terhadap polisi tidak membuat para istri mujahid ini menuntut bantuan. Sebaliknya, mereka cukup selektif dalam menerima bantuan, apalagi yang datang dari pemerintah. Mereka tidak suka dikasihani dan berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya, mulai dari menjual obat herbal, makanan dan minuman ringan, terkadang pinjam sana-sini. Kelompoknya sempat memberi bantuan finansial secara langsung namun tidak berkelanjutan. Keringanan yang sampai saat ini masih mereka terima adalah pengurangan biaya sekolah untuk anak-anak.

Dari semua istri napiter yang kami temui, Umi Khadijah (bukan nama sebenarnya) adalah yang paling berada. Dia istri ketiga Iskandar (telah dijelaskan sebelumnya) yang baru menikah Maret 2017, beberapa bulan setelah Iskandar bebas dari tahanan dan datang ke Bima. Dia menamatkan pendidikannya di IKIP Mataram dan sempat menjadi guru PNS. Setelah menyadari pekerjaannya bertentangan dengan ajaran yang dia yakini, dia memutuskan berhenti dari pekerjaannya itu dan berdagang buah di Bima. Usahanya ini berskala cukup besar. Dia mengambil buah dari Mataram yang lalu dijual secara eceran oleh beberapa istri para mujahid. Keuntungan penjualan digunakan sebagai modal untuk bulan selanjutnya. Kemandirian ekonomi ini membuatnya tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dia mengaku pernah didatangi BNPT yang menawari bantuan, salah satunya melalui Lurah Penatoi, namun bantuan itu ditolak mentah-mentah.

⁴⁰ Wawancara dengan Umi Fathanah, 20 Oktober 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Umi Fathanah, 20 Oktober 2018.

⁴² Wawancara dengan Umi Siti (bukan nama sebenarnya), 12 Desember 2018.

Keluarga Umi Khadijah sangat dekat dengan kelompok ekstremis. Selain suaminya, kakaknya, Adrian, juga terlibat dalam aksi terorisme dan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor. Adiknya, Hadi, adalah salah satu jihadis yang meninggal di Suriah tahun 2014. Status dan keterlibatan keluarganya dengan aksi-aksi kekerasan ini tidak membuatnya menghadapi banyak masalah di masyarakat karena dia lahir dan besar di lingkungan tersebut dan terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Terkait keterlibatan perempuan dalam berbagai aksi terorisme, Umi Khadijah mengaku tidak tahu banyak. Baginya, jihad perempuan adalah mendidik anak dan berbakti pada suaminya. Perempuan yang ambil andil dalam aksi bom bunuh diri dianggap sebagai kelompok yang beda aliran atau asal tangkap. Namun, jika ada perintah dari Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS, agar perempuan juga turun tangan, dia siap untuk melaksanakannya. Katanya,

Kita juga harus mengukur [apa kita mampu] menahan siksaan dari *thaghut* kalau kita ditangkap. Bukan berarti kita takut. *Enggak* ada kayaknya, perintah di sana [terkait jihad bagi perempuan]. Jihad wanita adalah di rumah, bawahi anak-anak, ajari anak-anak. Taati Allah dan *ulil amri* [pemimpin] yang menegakkan Syariat Allah, bukan Jokowi itu... [Surat] al-Fatihah *aja enggak* bisa dia. Nah, *ulil amri* kita [yang] di sana itu. Bangga kita *nih* bilangannya: Abu Bakar al-Baghdadi.⁴³

4. Dinamika Lingkungan Radikal

Meskipun tertutup dan bergerak di bawah tanah, kelompok ekstremis kekerasan tidak bisa dipandang sebagai kelompok yang terlepas sepenuhnya tanpa dukungan dari lingkungan sekitarnya. Banyak studi menunjukkan bahwa radikalisme dan kekerasan ekstremis adalah hasil dari proses sosial politik yang melibatkan berbagai macam aktor dan kelompok sosial (Malthaner dan Waldmann, 2014: 2). Mereka sering kali muncul dan beroperasi di lingkungan sosial yang menopangnya dan inilah yang dimaksud oleh laporan ini sebagai lingkungan radikal.

Lingkungan radikal ini dapat terbentuk mendahului atau bersamaan dengan pembentukan kelompok ekstremis. Misalnya, beberapa kelompok yang tak puas terhadap kelompok yang lebih moderat kemudian mengambil jalan yang lebih keras dari lingkungan radikal ini. Akan tetapi, lingkungan radikal juga bisa muncul belakangan sesudah kelompok ekstremis. Misalnya, kelompok ekstremis di bawah tanah membentuk organisasi pendukung yang legal atau semi-legal di atas permukaan untuk mendukung operasinya, melancarkan tekanan, dan menggalang dukungan publik.

Jika kelompok ekstremis kekerasan dicirikan oleh penggunaan kekerasan dan struktur yang cenderung tertutup, lingkungan radikal dicirikan oleh struktur yang lebih terbuka (baik dari segi struktur organisasi, ruang, media dan komunikasi), dan aktivitasnya

⁴³ Wawancara dengan Umi Khadijah, 12 Desember 2018.

militan tapi masih dalam batas yang dianggap legal (Malthaner dan Waldmann, 2014: 11). Mereka berbeda-beda dalam hal ukuran, komposisi, dan tingkat kecairan batasnya dengan kelompok yang lebih keras maupun masyarakat yang lebih luas. Di Bima, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bagian berikutnya, batas ini tidak selalu bisa ditarik dengan jelas.

Peran lingkungan radikal di sini bukan sekadar *hotbed* penyemai aktor kekerasan, tetapi lebih kompleks dan ambivalen. Kelompok ekstremis di Bima mendapat dukungan dari lingkungan radikal, tetapi hubungan keduanya juga diwarnai ketegangan dan konflik, yang dapat membuat mereka makin mengeras atau melunak. Bagian ini akan mengulas lebih jauh dinamika tersebut dengan mengamati pola interaksi antara (1) kelompok ekstremis dengan lingkungan radikal yang mendukungnya, maupun (2) antara lingkungan radikal dengan lingkungan sosial dan politik yang lebih luas (termasuk aktor negara, pihak lawan, gerakan lain, serta masyarakat setempat). Karena letaknya yang berada di tengah dua lingkungan tersebut (luar dan dalam), lingkungan radikal memiliki peran yang ambivalen dalam proses eskalasi dan deeskalasi kekerasan.

Lingkungan radikal di Bima cukup terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, tetapi hal itu tidak disebabkan oleh rasa kepemilikan yang mengakar pada suatu wilayah. Pusat-pusat lingkungan radikal di Bima juga bukanlah daerah yang jauh dari jangkauan negara. Daerah yang menjadi pusat lingkungan radikal di Bima tampaknya lebih disebabkan pemimpin gerakan radikal bertempat tinggal di daerah tersebut dan jaringan radikal cukup lama berkembang dari sana. Lingkungan radikal di Bima yang terkonsentrasi itu turut mempererat kohesi sosial di antara mereka. Di luar perbedaan-perbedaannya, organisasi dan gerakan keislaman di Bima juga cukup kompak ketika melakukan aksi atau protes untuk isu-isu tertentu.

Batas lingkungan radikal dengan kelompok yang lebih keras maupun masyarakat yang lebih luas di Bima cukup cair. Ini kemungkinan disebabkan oleh struktur dan cara komunikasi kelompok ekstremis di Bima yang tidak sepenuhnya tertutup. Pengajian kelompok yang lebih keras memang tertutup dari kalangan umum, tetapi pengajian dan dakwah dengan tema yang tak jauh berbeda disampaikan untuk publik di masjid-masjid. Tema-tema seperti akhir zaman, Bani Israil, dan khilafah disampaikan dengan membedah suatu kitab di masjid umum secara berkala hingga beberapa bulan. Kontak langsung sehari-hari antara aktor kekerasan dengan lingkungan pendukung dan keluarganya juga tampaknya berlangsung dengan relatif leluasa.

Hubungan lingkungan radikal di Bima dengan aktor negara, khususnya aparat keamanan, cenderung konfrontatif dan konfrontasi ini sering kali makin memperkeras lingkungan radikal. Kasus-kasus penangkapan yang menyasar orang-orang di lingkungan radikal, tetapi juga kasus salah tangkap, makin berdampak pada radikalisasi. Cerita-cerita mengenai kekejaman polisi biasa disampaikan kepada orang terdekat. Dan ini tidak hanya ditafsirkan sebagai serangan terhadap kelompok radikal tapi serangan terhadap “kaum Muslim” secara umum, sehingga masyarakat “luar” dapat tertarik bergabung dengan lingkungan radikal.

Namun, represi aktor negara juga dapat memecah dan mengisolasi lingkungan radikal

dari lingkungan atau gerakan yang lebih luas. Ini misalnya tampak dalam peristiwa ledakan dan penyerbuan Pesantren UBK yang untuk beberapa waktu membuat banyak kelompok sulit bergerak. Seorang narasumber dari Wahdah Islamiyah mengeluh bahwa sesudah peristiwa tersebut, hampir semua organisasi Muslim, termasuk organisasinya, dicurigai pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi radikal.⁴⁴

Peristiwa tersebut juga cukup menyurutkan dukungan sosial terhadap lingkungan radikal. Pesantren UBK kini sudah ditutup dan pesantren lain yang sebagian guru dan mantan santrinya terlibat kasus terorisme seperti Pesantren Khalid bin Walid, kini sudah makin ditinggalkan. Tahun lalu santrinya tak lebih dari 20 orang dan itu pun berasal dari luar Bima. Sementara itu, pesantren Al Madinah, yang sebelumnya dianggap pesantren radikal, kini sudah membuka diri terhadap bantuan dan mau bekerjasama dengan pemerintah.

Dinamika interaksi lingkungan radikal dengan lingkungan “luar” juga tampak dari hubungan FUI dengan pemerintah daerah. Pada awalnya, pemerintah daerah mencurigai FUI. Ketika mereka berencana melakukan aksi 212 di Bima, misalnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) memutuskan untuk tidak memberi izin. Hal ini disampaikan pimpinan FUI di Bima:

Awalnya mereka menolak memberi izin [aksi]. Kami [bersikap] *bodo* amat. Ini aspirasi yang [harus] disampaikan. Ini hal yang dilindungi undang-undang. Ulama-ulama sepuh di Bima sudah lebih dulu memahami kami. ... kami tidak ada tendensi untuk melakukan tindakan radikalisme... Sehingga ketika FKPD menetapkan agar kami tidak diberi izin, [hal itu] dimentahkan para ulama. Akhirnya sejak itu, pemerintah sudah memahami.⁴⁵

Kini, hubungan FUI dengan pemerintah berubah jadi dekat dan setiap akan melakukan aksi, FUI selalu bersurat untuk memberi tahu dan mengajak berbagai organisasi dan pemerintah (Dandim, Polres, dan Pemda). Dalam kata-kata pimpinannya, “FUI tetap tegas tapi dengan cara elegan.”⁴⁶

Dinamika juga dapat ditemukan dalam interaksi di antara berbagai kelompok dalam lingkungan radikal. Berbagai kelompok dengan kepentingannya masing-masing saling memanfaatkan dan saling bersaing memperebutkan dukungan dan hal ini tak jarang mengubah strategi dan posisi mereka. Sebagai contoh, HTI yang sebelumnya tergabung dengan FUI belakangan memisahkan diri. Alasannya adalah karena HTI, menurut pimpinan FUI di Bima, “tidak bisa kompromi, orang lain harus ikut dia. Jadi keluar dari FUI. ... Setiap ormas punya kelebihan dari sisi Syari’ah. Tidak ada yang menganggap diri lebih baik dan lebih rendah. Sehingga bisa bersatu.”⁴⁷

⁴⁴ Wawancara dengan Mulyadin, salah satu pimpinan Wahdah Islamiyah di Bima, 11 Februari 2019.

⁴⁵ Wawancara dengan Asikin, Ketua Forum Umat Islam (FUI) di Bima, 12 Februari 2019

⁴⁶ Wawancara dengan Asikin, 12 Februari 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan Asikin, 12 Februari 2019.

Hubungan yang ambivalen tidak hanya ditemukan dalam interaksi antara lingkungan radikal dengan lingkungan yang lebih luas, tetapi juga dalam interaksi mereka dengan kelompok ekstremis di “dalam” atau “bawah tanah.” Keduanya bisa saling mendukung dan memanfaatkan, tetapi tak jarang mereka juga bertentangan dan semakin menjauh. Dalam kasus tertentu, lingkungan radikal dirugikan oleh aksi kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis, dan sebaliknya, kelompok ekstremis bisa berbalik memusuhi lingkungan radikal dengan begitu sengit karena mereka dianggap musuh dalam selimut.

Tetapi terlepas dari perbedaan-perbedaannya, mereka sebenarnya adalah sekutu yang menuju ke arah tujuan yang kurang lebih sama. Hubungan lingkungan radikal dengan kelompok yang lebih keras di bawah tanah dimungkinkan oleh penafsiran yang sama dalam melegitimasi gerakannya, dan dalam menetapkan siapa kawan dan lawannya. Inilah yang terutama menghubungkan lingkungan radikal dengan kelompok ekstremis. Seperti digambarkan seorang petinggi JAS di Bima, semua kelompok yang memperjuangkan khilafah pada dasarnya adalah sama. Mereka adalah “perahu-perahu kecil” *jama`atul min al-Muslimin* (sebagian kelompok dari umat Muslim), yang sama-sama menuju rumah besar *jama`atul Muslimin* (umat Muslim).⁴⁸

Dengan kesamaan pandangan tersebut, lingkungan radikal pada dasarnya memiliki kesediaan untuk mendukung aktivis bawah tanah yang lebih keras, baik berupa dukungan moral maupun logistik. Dukungan logistik antara lain berupa tempat persembunyian, transportasi, penyampaian pesan, penggalangan dana, dan sebagainya. Sedangkan dukungan moral misalnya dalam bentuk aksi dan pernyataan publik untuk memprotes penembakan atau penahanan sewenang-wenang, penganiayaan tahanan, atau dengan mengantar jenazah ikhwan yang “syahid” ke pemakaman.

Selain memberi dukungan, lingkungan radikal juga mengambil keuntungan dari kelompok yang lebih keras. Mereka mengambil manfaat dengan mendelegasikan, membenarkan atau membiarkan penggunaan kekerasan oleh kelompok ekstremis, dan berperan sebagai sayap yang legal bagi mereka, untuk mengubah serangan menjadi momentum politik (Malthanner 2014: 27-28). Sebagaimana pengakuan salah seorang anggota Kodim Bima:

Bima sangat terpengaruh situasi di Jakarta. Ketika ketua PA 212, Samsul Maarif, ditetapkan jadi tersangka kasus pelanggaran kampanye, beberapa kelompok di Bima melakukan aksi solidaritas atas “penzaliman ketua PA 212.” Begitu juga soal pembatalan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Beberapa kelompok merencanakan aksi solidaritas.⁴⁹

Tetapi di luar relasi yang simbiosis itu, hubungan keduanya juga tak jarang diwarnai ketegangan dan perselisihan. Seperti diuraikan sebelumnya, lingkungan radikal tidak memberi dukungan yang tanpa syarat begitu saja kepada kelompok ekstremis kekerasan. Ada batasan mengenai mana yang dianggap absah atau dibenarkan dari segi sasaran

⁴⁸ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, pimpinan Jamaah Anshorus Syariah (JAS) di Bima, 12 Februari 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Dahlan, anggota Kodim Bima, 12 Februari 2019.

serangan, pola sasaran (acak, membahayakan nyawa tak berdosa, perempuan, dan anak-anak), atau bentuk kekerasan (mutilasi, bunuh diri). Pasca beberapa upaya serangan terhadap polisi yang gagal di Bima, sebagian ikhwan misalnya memutuskan untuk meninggalkan kekerasan setelah menganggap strategi itu tidak efektif dan menganggapnya seperti mati sia-sia.

Ketegangan ini juga tampak dari hubungan JAS atau FUI dengan JAD. FUI tidak mendekati kelompok-kelompok takfiri, tetapi juga tidak berusaha mempengaruhi atau mencegah mereka. “Mereka sudah punya keyakinan sendiri. Kebencian dan kecemburuan mereka lebih besar. Mereka mengkafirkan kita, tetapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka,” kata pimpinan FUI.⁵⁰ Penuturan pemimpin JAS tentang kelompok JAD juga menggambarkan ketegangan ini:

Kita melihat jemaah ini arahnya sudah mulai lain. Binaan-binaan saya dilarikan orang akhirnya. Sementara saya tak boleh larang orang mau ngaji ... ke satu orang. Baru ngaji sebulan dua bulan sudah berubah warnanya. “Ini kafir, itu kafir, PNS haram.” Saya kaget, ‘kok begini? Saya tak pernah mengajarkan begini... Saya prihatin, ‘kok sampai begini? Sampai sekarang ada gerakan itu... Anggota kita saja banyak yang mengaji ke sana. Namanya anak muda, senang dengan yang ... tapi saya sudah mulai bisa baca... Ini bahaya... ternyata benar. Kejadian di beberapa tempat. Tidak meleset dari apa yang saya [perkirakan].⁵¹

Di tataran individual, lingkungan radikal adalah lingkungan tempat seseorang pertama kali mengenal penafsiran, nilai dan simbol, dan pengalaman kekerasan yang sama. Di dalamnya ada hubungan pertemanan dan kekerabatan yang memberi jalan bagi mereka untuk bergabung ke kelompok ekstremis serta mempertebal komitmen dan solidaritasnya. Lingkungan ini tidak hanya sekadar penyemai, tetapi mereka juga mencegah banyak aktivis untuk melangkah lebih lanjut ke kelompok ekstremis kekerasan dengan memberikan, misalnya, bentuk dan kesempatan aktivisme lain selain bergabung dengan kelompok ekstremis. Lingkungan ini juga bisa menampung mereka yang ingin meninggalkan kelompok ekstremis tetapi urung karena tidak mau meninggalkan keyakinan, komitmen, atau temannya. Ringkasnya, lingkungan radikal ini memberikan cara bagi mereka untuk tetap berjuang sambil meninggalkan kekerasan.

Sementara di tataran kolektif, hubungan yang bercampur aduk antara dukungan dan pertentangan itu menggulirkan proses tarik-menarik yang terus-menerus antara kelompok ekstremis di bawah tanah dan lingkungan terdekatnya yang radikal. Negosiasi dan perdebatan ini bisa berlangsung secara terbuka atau tertutup. Kelompok yang lebih ekstrem bisa saja keluar dari proses ini dengan menjadi semakin terisolasi dan membabi buta sehingga kekerasan lebih tak terkendali. Tetapi karena ketergantungannya pada lingkungan radikal, banyak kelompok ekstremis tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika lingkungan radikal mengecam dan mendesak mereka untuk meninggalkan kekerasan.

⁵⁰ Wawancara dengan Asikin, 12 Februari 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Ustaz Abdul Hakim, 12 Februari 2019.

Di Bima, kami melihat bahwa lingkungan radikal bukan saja mendukung tetapi juga mengekang kelompok-kelompok ekstremis.

IV. LANGKAH-LANGKAH BINADAMAI

Meskipun ada kelompok-kelompok teror dan lingkungan radikal di Bima, di wilayah itu juga kita temukan langkah-langkah penguatan infrastruktur binadamai yang berlangsung cukup baik. Langkah-langkah ini berlangsung di sektor keamanan yang makin kuat fungsi pengawasan dan intelijennya, bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi yang mulai diterima, dan penguatan hubungan-hubungan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Bahkan di kantong Penatoi kita menemukan tanda-tanda menuju perbaikan yang menjanjikan. Kita hanya perlu mendorongnya lebih jauh.

1. Peningkatan Pengawasan di Sektor Keamanan

Pengawasan terhadap kelompok-kelompok teror di Bima tampak lebih kuat belakangan ini. Hal ini khususnya terasa di Kota Bima dibanding di Kabupaten Bima. Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa Walikota Bima yang sekarang, Muhammad Lutfi, lebih peduli terhadap masalah ini dibanding pendahulunya. Dia misalnya sudah merencanakan koordinasi yang lebih menyeluruh, meskipun usia pemerintahannya baru beberapa bulan (dilantik September 2018), sehingga konsistensi kinerjanya masih harus dilihat lebih jauh.

Langkah-langkah pengawasan di atas dilakukan baik oleh anggota Polri maupun TNI. Di atas misalnya sudah disebutkan bahwa TNI ikut memulangkan Umi Delima, istri almarhum Santoso, ke Bima sesudah dia keluar dari penjara. Dia dicegah pulang ke Poso meskipun anaknya ada di sana, karena dikhawatirkan dia akan kembali terlibat dalam jaringan terorisme kelompok MIT. Meskipun menyambut baik inisiatif pihak TNI ini, Yusuf Tauziri, Wakapolres Kota Bima, mengeluhkannya karena pihaknya sendiri tidak diberitahu mengenainya.⁵²

Masalah koordinasi seperti ditunjukkan di atas adalah masalah terbesar dalam pengawasan atas kelompok-kelompok teror di Bima. Koordinasi hanya dilakukan jika ada ancaman jangka pendek, seperti ketegangan akibat beredarnya isu-isu seperti kriminalisasi ulama atau pembakaran masjid di Tolikara, yang mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mengadakan rapat misalnya di Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Di luar itu, koordinasi dalam rangka pencegahan dan berdampak jangka panjang bisa disebut tidak ada.

Terkait kelompok-kelompok garis keras di Kelurahan Penatoi, misalnya, tidak ada langkah-langkah bersama yang misalnya dikoordinasi oleh pemerintahan daerah atau kota. Bagaimana jika “masalah Penatoi” itu disebut sebagai bencana sosial, sehingga koordinasi mengenainya lebih kuat? Wakapolres Kota Bima, yang lebih berpengalaman dengan masalah ini dibanding Polresnya yang baru dilantik, memiliki pandangan menarik, meskipun dia tidak terlalu optimistik mengenainya:

⁵² Wawancara dengan Yusuf Tauziri, 11 Februari 2019.

Seharusnya begitu.... Kalau setahu saya, itu 'kan bencana sosial dan yang bertanggung jawab memang Pemda. Kalau begitu, dasarnya UU [Penanganan] Konflik Sosial, pasti 'kan Pemda harus pimpin. Tetapi sekarang, kita jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak, seperti sekarang, otomatis tidak ada anggaran yang masuk ke kita untuk bergerak. Kita misalkan mau buat gerakan preemtif berupa penyuluhan, susah [bagi kita] cari bentuk kerjasama dengan Pemda seperti apa. Akhirnya kita jalan sendiri. Ada fungsi bimas [bimbingan masyarakat], tetapi kurang efektif. Salah satu contoh ya itu ... penanganan [atas] istrinya Santoso ... [itu] bukan penanganan tersistem, tetapi inisiatif Kodim. Saya liat mungkin ada yang dilakukan Pemkot tetapi kita tidak tahu karena tidak ada rapat koordinasi untuk menangani Penatoi selama satu tahun lebih saya di sini.⁵³

Terlepas dari masalah di atas, polisi misalnya tetap berusaha makin memperkuat fungsi intelijen dan hubungannya dengan masyarakat.

Kita mendeteksi orang-orang baru yang masuk ke Penatoi. Misalnya dia dari Poso. Kita sudah tahulah Poso itu seperti apa. Nantinya dilaporkan ke kapolsek di mana orang baru itu menetap, agar diawasi. Lalu kapolsek melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi di Polda. Kalau *enggak* ada indikasi [ke arah aksi terorisme], *enggak* masalah. Kalau ada indikasi, pasti kita teruskan untuk diikuti lebih jauh. Dia mau ngapain di sini? Dia mengembangkan ajarannya, mengambil atau mengajak orang, misalnya?⁵⁴

Pengawasan juga dilakukan dengan mendekatkan hubungan polisi dengan beberapa anggota kelompok-kelompok teror yang misalnya baru keluar dari penjara. Kepada kami, seorang petugas polisi menunjukkan beberapa dokumentasi terkait usahanya membantu beberapa ikhwan atau mantan napiter memperoleh dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keperluan untuk memberi bantuan kepada anggota kelompok ini agar mereka makin terintegrasi, di satu pihak, dengan ketegasan yang juga perlu bahwa pemberian dukungan ini hanya berlangsung sementara dan mereka tidak boleh bersikap seperti preman yang bisa menggunakan ancaman untuk mendapat pertolongan, di pihak lain. Ditanya mengenai soal ini, polisi di atas menjawab, "Kita harus bekerja pelan-pelan.... Harus berproses."

Mengingat bahwa polisi merupakan sasaran utama aksi-aksi teror di Bima selama ini, petugas polisi yang disebut di atas menyadari bahwa apa yang dilakukannya penuh risiko. Dia mengaku pasrah saja, sambil menyatakan bahwa yang dilakukannya juga dia niatkan sebagai ibadah. "Saya juga orang beragama," katanya. Dia hanya mengeluhkan kurangnya dukungan orang dan dana agar dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pada satu kesempatan dia juga mengeluhkan perintah atasannya untuk mengantarkan mayat seorang teroris yang tewas di tangan Densus 88 ke rumah keluarganya di Kelurahan

⁵³ Wawancara dengan Yusuf Taziri, 11 Februari 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Amanda, Kasat Intel Polres Kota Bima 12 Februari 2019.

Penatoi. “Ini berat sekali. Kami diminta untuk menjalin hubungan dengan mereka, tetapi saya disuruh [diperintahkan] untuk mengantarkan mayat yang pasti membuat saya sasaran kemarahan [mereka].”

Sementara itu, di Kabupaten Bima, mengurus kelompok-kelompok teror kini bukan lagi prioritas utama, karena jumlah mereka yang relatif kecil dan pada umumnya hanya pengikut, dengan “sebagiannya mantan preman,” kata satu narasumber. Selain itu, dua pesantren di wilayah ini, yang dulu dianggap pusat pendidikan kelompok teror, yakni Pesantren UBK dan Al Madinah, kini dianggap bukan lagi ancaman: UBK kini sudah tutup, sedang Al Madinah sudah mau diajak kerjasama dengan pemerintah, misalnya lewat BNPT.⁵⁵

2. Bantuan Ekonomi dalam rangka Reintegrasi

Karena perkembangan ekstremisme kekerasan yang berlangsung di Bima, salah satu masalah besar di Bima adalah masalah yang terkait dengan bantuan ekonomi kepada kelompok-kelompok rentan akibat keterlibatan dalam kekerasan terorisme. Dari segi ini, ada beberapa hal yang penting dilaporkan dan didiskusikan di sini.

Pertama, seperti sudah dibahas sebelumnya, berbeda dari di Poso di mana pertumbuhan kelompok-kelompok teror terkait dengan konflik kekerasan di masa lalu, misalnya karena dendam, di Bima pertumbuhan kelompok-kelompok itu khusus terkait dengan dukungan mereka kepada ideologi yang mendasari aksi-aksi teror ini. Karena alasan yang terakhir, para ikhwan atau mantan napiter di Bima akan pertama-tama menolak tawaran bantuan apa pun, apalagi yang datang dari pemerintah. Kata satu narasumber yang minta namanya disamarkan:

Selama saya berdiskusi dengan mereka, [mereka] tidak pernah mau [menerima bantuan] jika ada embel-embel dari pemerintah. Mereka menganggap BNPT dan Densus 88 ini sama ... musuh. [Bantuan] Kesbangpol dan Pemda akan mereka terima, [karena] ‘kan ... tidak pernah menangkap dan membunuh. Itu pun tergantung kepada siapa atau lembaga apa yang menyalurkan. [Karenanya] dana bantuan yang diberikan saya sampaikan [dengan cara tidak langsung] ... bahwa ini adalah bantuan dari saya sendiri. Bahkan [itu pun] mereka tidak cukup puas juga, mereka meminta saya untuk menjelaskan pendapatan/gaji saya bersumber dari mana, saya jelaskan kepada mereka, menggunakan banyak pendekatan.

Meski demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu, beberapa orang dari kelompok radikal di Penatoi, misalnya, tetap bersedia menerima bantuan. Semua narasumber menyebutkan bahwa ketika Bima dilanda banjir besar pada Maret 2017, orang-orang di Kelurahan Penatoi menerima bantuan bahkan dari pengusaha non-Muslim.⁵⁶ Selain

⁵⁵ Wawancara dengan Abdi, Wakapolres Kabupaten Bima, 12 Februari 2019.

⁵⁶ Lihat liputan medianya di sini “Dinsos NTB suplai bantuan banjir Bima,” *Antaraneews.com*, 26 Maret 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/620499/dinsos-ntb-suplai-bantuan-banjir-bima> (diakses 18 Mei 2019).

itu, meski sangat kritis terhadap bantuan pemerintah, beberapa perempuan yang terkait dengan kelompok-kelompok di atas bersedia menerima bantuan, asal syarat-syaratnya memungkinkan. Kata salah seorang di antaranya:

Pada tahun 2015, BNPT dan Densus [88] datang [mau] memberi bantuan melalui kantor lurah. [Mereka] mau kasih uang sepuluh juta [rupiah]. Tapi ada persyaratannya, harus tidur di hotel tujuh hari, ikut penataran gitu, pelatihan. Saya bilang, “Kalau kalian mau kasih saya segitu, buat apa saya ke sana? Justru anak saya [yang] saya *tinggalin* ... buat dapat sepuluh juta?” Berarti [maksud] kalian ini bukan itu! Anak bayi-bayi ini saya *tinggalin* untuk sepuluh juta?!⁵⁷

Masalah kedua terkait bantuan adalah koordinasi. Beberapa narasumber melaporkan, selama ini ada bantuan dari Kesbangpol dan Pemda setempat. Media massa juga melaporkan bantuan-bantuan dari BNPT, Polres, atau Kodim. Sayangnya, seperti juga terjadi di tempat-tempat lain seperti Poso, tidak ada koordinasi di antara satu dan lain lembaga yang memberikan bantuan (lihat McRae, 2009; Hwang, Panggabean, dan Ali-Fauzi, 2013). Di Bima, masalah ketiadaan koordinasi ini diakui misalnya oleh Wakapolres Kota Bima, seperti sudah disinggung. Hal ini juga diakui Eka Iskandar Zulkarnain, yang pernah dimintai bantuannya untuk menyalurkan bantuan: “Perlu ada sinergi... Pastikan datanya benar agar tidak salah sasaran. Jangan sampai satu orang menerima beberapa kali, tetapi yang lain tidak dapat sama sekali.”⁵⁸

Apakah bantuan-bantuan di atas sudah mengenai sasaran? Kami tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini, karena ketiadaan informasi mengenai. Tetapi salah satu contoh bantuan yang dianggap mencapai sasaran adalah bantuan BNPT kepada Pesantren Al Madinah di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dulu dianggap salah satu sumber pendidikan radikal di Bima.⁵⁹ Pesantren ini antara lain dilaporkan pernah menolak mengibarkan bendera merah putih, sehingga pada Juli 2017, Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyempatkan diri mengajak pengurus dan para santri di sana untuk menghormati bendera itu sebagai simbol perjuangan para ulama di Indonesia.⁶⁰ Menurut beberapa narasumber, berkat bantuan-bantuan di atas, pesantren ini belakangan menjadi lebih terbuka. Perubahan ini juga diakui Ketua MUI NTB, Saiful Muslim: “Awalnya mereka sangat tertutup sekali. Namun akhirnya lama-lama ada perubahan dan menjadi lebih terbuka. Sekarang sudah normal.”⁶¹

⁵⁷ Wawancara dengan Umi Siti (bukan nama sebenarnya), 12 Desember 2018. Seorang perempuan kawannya menambahkan, “Tidak perlulah pelatihan wirausaha. Langsung terjun ke lapangan saja. Kalau pemerintah mau kasih ayam, mau saya. Saya buka lapangan kerja.” Wawancara dengan Umi Nurmila (bukan nama sebenarnya), 12 Desember 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan Eka Iskandar Zulkarnain, 12 Februari 2019.

⁵⁹ “BNPT Bantu Ponpes Al Madinah,” *Bimakini.com*, 10 Agustus 2018, <https://www.bimakini.com/2018/08/bnpt-bantu-ponpes-Al-Madinah/> (diakses 10 April 2019).

⁶⁰ Lihat “TGB Ajak Ponpes Al Madinah Bima Kibarkan Dan Hormati Bendera Merah Putih,” *Bimakini.com*, 9 Juli 2019, <https://www.bimakini.com/2017/07/ponpes-Al-Madinah-bima-diajak-hormati-bendera-merah-putih/> (diakses 27 Januari 2019).

⁶¹ Lihat “MUI NTB Sebut Tiga Pondok Pesantren Ajarkan Ideologi Radikal,” *Okenews.com*, 12 Juni

Menurut Ustaz Jabir yang memimpin pesantren di atas, bantuan BNPT terdiri dari dana antara lain untuk memperbaiki Masjid Al Madinah dan pembangunan bangunan untuk santriwati. Ketika kami mengunjungi pesantrennya, Ustaz Jabir mengeluhkan pesantrennya yang dia sebut “terisolasi” karena masyarakat masih mencurigai lembaga pendidikan yang diasuhnya itu.⁶² Sambil menunjukkan kepada kami tiang bendera, masjid, dan asrama putri yang pembangunannya dibantu dana BNPT, dia juga mengaku baru belakangan tahu bahwa istri Santoso adalah mantan muridnya dan bahwa dia tidak mengetahui kepergian mantan muridnya itu ke Poso untuk bergabung dengan kelompok MIT Santoso.

3. Membangun Jembatan: Langkah-langkah FKUB Kota Bima

Di atas kami sudah menyebut nama Eka Iskandar Zulkarnain beberapa kali. Tetapi inisiatif-inisiatif tokoh ini memang patut didiskusikan secara khusus dalam rangka kontraterorisme atau deradikalisasi, atau apa pun namanya, di Bima.

Lahir di Bima, Eka menghabiskan banyak masa mudanya untuk dididik di Jawa. Sesudah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri di Jember, dia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Surabaya dan program master di Universitas Muhammadiyah Malang. Belakangan, selain posisinya sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) di Kemenag Kota Bima, dia juga Ketua Muhammadiyah Kota Bima dan ikut mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah di Kota Bima. Tetapi perannya sebagai pembangun jembatan di antara kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah di Kota Bima paling menonjol ketika dia memimpin FKUB di sana selama dua periode (2006-2018). Sesudah itu dan hingga sekarang, dia memimpin Lembedara (Lembaga Bina Damai Resolusi Agama), yang dibentuk untuk melanjutkan inisiatif-inisiatifnya selama ini di FKUB.

Di bawah kepemimpinannya, FKUB Bima rutin menyelenggarakan acara-acara diskusi dengan tema-tema cukup peka seperti fikih jihad. Karena posisinya yang penting dan jaringannya yang luas, Eka berhasil mengundang tokoh-tokoh menonjol dari ormas seperti JAS, JAT, FUI, Khilafatul Muslimin, atau HTI di Bima untuk terlibat baik sebagai narasumber maupun peserta. Mereka juga kadang mendiskusikan tema-tema kebangsaan seperti soal Pancasila dan NKRI. Dalam hal ini dia didukung banyak sahabatnya di Kemenag dan Muhammadiyah.

FKUB di bawah kepemimpinan Eka juga rutin menyelenggarakan acara-acara silaturahmi yang mempertemukan wakil-wakil pemerintah dan aparat keamanan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Acara-acara ini biasa diliput media massa. Ketika PUSAD Paramadina menerbitkan buku panduan *Melawan Hasutan Kebencian* pada awal 2019, kami juga diminta mempresentasikan isi buku itu, berdampingan dengan wakil dari Kodim dan Polres setempat serta wakil ormas Islam.

2017, <https://news.okezone.com/read/2017/06/12/340/1714340/mui-ntb-sebut-tiga-pondok-pesantren-ajarkan-ideologi-radikal> (diakses 23 Januari 2019).

⁶² Wawancara dengan Ustaz Jabir, 11 Desember 2018.

Di atas sudah kami singgung peran Eka dalam menyalurkan bantuan. Karena hubungan-hubungan baik yang sudah dibangunnya selama ini termasuk dengan kelompok-kelompok Igaras di Kelurahan Penatoi, dia termasuk salah satu jalur pemberian bantuan yang bisa diterima kelompok-kelompok di atas. Baginya, ini adalah pintu masuk sebelum kita bisa berbicara lebih jauh dengan mereka misalnya mengenai paham kebangsaan mereka.

Sejauh mana usaha-usaha Eka di atas berhasil? Hal ini masih harus dilihat lebih jauh lagi. Tetapi banyak narasumber menyebutkan bahwa dia termasuk berhasil mendorong setidaknya satu tokoh berpengaruh dari kelompok di atas untuk keluar dari “kepompongnya” dan bersikap lebih terbuka kepada pihak-pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini dimulai ketika Eka membantu istri sang tokoh ketika hendak melahirkan:

Ketika saya mengetahui istri dari ... tersebut akan melahirkan, saya bantu mereka dari [mulai] menyiapkan mobil ambulans sampai pengurusan persalinannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima. Sebelumnya ... kami belum saling mengenal. Dari situlah ... [dia] mulai dapat menerima saya dan kami berhubungan baik. Belakangan, saya juga berhasil meyakinkan istri yang bersangkutan untuk membeli mobil secara kredit.⁶³

Langkah-langkah di atas mencontohkan cara-cara Eka membangun binadamai secara kreatif dan dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada. Tetapi dia juga dikenal sebagai pembangun jembatan yang tegas. Dalam hal ini, koordinasi dengan semua pihak sangat perlu: “Mereka perlu dibantu. Tapi jangan sampai sumbangan yang diberikan malah disalahgunakan untuk membeli senjata..... Prinsipnya, ‘rangkul dan pukul.’ Kita perlu merangkul mereka, tetapi sesekali juga perlu memukul mereka, biar [mereka] *enggak* mentang-mentangan,” katanya suatu kali.

4. Fenomena Unik Abu Asad dan Umi Aisyah

Salah satu perkembangan menarik dari fenomena ekstremisme kekerasan di Bima terkait dengan seorang tokoh bernama Abu Asad (bukan nama sebenarnya) dan istrinya, Umi Aisyah (bukan nama sebenarnya). Abu Asad lahir di Kabupaten Bima, tetapi belakangan kawin dengan Umi Aisyah, perempuan asal Kota Bima. Mereka kini menetap di Kelurahan Penatoi dengan lima orang anak yang masih kecil-kecil.

Abu Asad adalah lulusan satu perguruan tinggi di Malang dalam bidang keguruan dan menghabiskan lebih dari sepuluh tahun usianya mengajar di Bima dan tempat-tempat lain. Ketika kuliah di Malang dan beberapa tempat lainnya, dia berlatih bela diri dan ikut dalam forum-forum pengajian kelompok ekstremis, sehingga dia mewarisi keduanya.

Belakangan Abu Asad dipercaya melatih para ikhwan dalam bidang bela diri, termasuk di Pesantren UBK. Beberapa narasumber menyebut bahwa dia adalah panglima perang kelompok di atas. Dia sendiri mengaku dekat dengan tokoh-tokoh seperti Iskandar dan sempat mengatur pengiriman orang atau dana dari Bima ke tempat-tempat lain di

⁶³ Wawancara dengan Eka Iskandar Zulkarnain, 12 Februari 2019.

Indonesia. Menariknya, dia sendiri tidak pernah ditangkap karena tuduhan terorisme.

Menurut beberapa narasumber, sikapnya mengenai pemerintah yang *thoghut* agak berubah belakangan ini. Selain hubungannya dengan tokoh-tokoh seperti Eka Kurniawan di FKUB, hal ini juga disebabkan kekecewaannya pada beberapa aksi teror di Bima yang menurutnya kurang pertimbangan. Dia menyatakan:

Terorisme itu tidak ada [hubungannya dengan] ideologi atau agama tertentu. Terorisme adalah kejahatan pribadi. Adanya bom itu dilakukan atas dasar pribadi yang emosi atau kekesalan yang memuncak terhadap simbol-simbol asing yang ingin menguasai negara kita. “Pada dasarnya kami tidak suka ada campur tangan asing di negara kami,” seperti itulah. [Aksi-aksi itu] tidak ada dorongan dari siapa-siapa ... [mereka] melakukan itu terpanggil sebagai umat Islam saja. Musuh kami adalah kemiskinan dan kebodohan dengan adanya simbol-simbol asing yang ingin menguasai negara ini.

Mengenai bantuan dari pemerintah, dia menyatakan: “Kami pribadi tidak menutup bantuan dari pemerintah. [Tetapi] ada kepatuhan [kami kepada] *amir* atau pemimpin kami, yang memutuskan diterima atau tidaknya bantuan tersebut.”⁶⁴

Menurut beberapa narasumber, salah satu pendorong perubahan sikap Abu Asad adalah istrinya, Umi Aisyah, seorang PNS. Setelah menikah, DIA dan Abu Asad memutuskan untuk menetap di Kelurahan Penatoi. Selama di sana, dia menyadari bahwa kelompok-kelompok yang tinggal di sana sangat eksklusif dan mudah meng-*kafir*-kan orang lain atau mengharamkan sesuatu, bahkan hal-hal kecil seperti pemotongan daging sapi. Hal ini agak berlainan dengan pandangannya yang melihat banyak hal baik meskipun datang dari kelompok luar, seperti yang dia temukan dalam lingkungan kerjanya. Karena alasan di atas, keluarga mereka mulai dijauhi, apalagi sejak Abu Asad semakin dekat dengan FKUB dan pemerintah. Meski demikian, Umi Aisyah tidak ambil pusing karena hidupnya tidak bergantung dari kelompok di atas, meskipun jalinan silaturahmi dengan mereka tetap dia jalin.

Umi Aisyah, yang sehari-hari bercadar, menentang keterlibatan suaminya dalam aksi-aksi kekerasan kelompok teror. Menurutnya, “Jika suami ingin melakukan jihad, lakukanlah di Afghanistan atau Suriah yang terang-terangan menjadi medan perang, bukan negara damai seperti Indonesia.”⁶⁵ Dia selalu mengingatkan suaminya bahwa jihadnya di sini adalah menjadi imam bagi keluarga dan ayah bagi anak-anaknya. Meskipun tidak menjamin suaminya lepas sama sekali dari jaringan itu, upaya Umi Aisyah untuk terus mengingatkannya menjadi salah satu faktor yang menahan Abu Asad dari terlibat lebih jauh dalam kegiatan kelompok teror.

Beberapa narasumber yang dekat dengannya menyatakan bahwa kepercayaan Abu Asad kepada polisi belakangan makin meningkat. Salah satu buktinya terkait *posting-*

⁶⁴ Wawancara dengan Abu Asad, 13 Februari 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan Umi Aisyah, 19 Oktober 2018 dan 11 Desember 2018.

an seseorang di Kabupaten Bima di laman Facebook, yang olehnya dan kelompoknya sudah dipandang sebagai penodaan agama dan melecehkan Muslimah bercadar. Alih-alih mempersekusinya dengan main hakim sendiri, Abu Asad menyerahkan kasus ini kepada polisi, meskipun dia dan kelompoknya sudah mendatangi si pelaku di Kabupaten Bima.⁶⁶

Hingga kini, Abu Asad masih berhubungan dekat dengan kelompok-kelompok radikal di Penatoi di atas. Karena alasan-alasan di atas, seorang narasumber menyatakan bahwa informasi darinya sudah tidak lagi bisa dipercaya atau relevan, karena dia sudah dikeluarkan dari organisasi. Ini penilaian yang berlebihan, karena kami sendiri sempat menyaksikan dia berbicara sangat akrab dengan pemimpin tertinggi kelompok itu di Kelurahan Penatoi. Informasi darinya harus didengar dan disaring, seperti informasi apa pun dan dari siapa pun juga.

5. Kabar Baik dari Kelurahan Penatoi?

Akhirnya, bahkan di Kelurahan Penatoi pun ada tanda-tanda menjanjikan ke arah binadamai. Di atas sudah dilaporkan tentang kesediaan beberapa di antara kelompok radikal di Penatoi untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain dan bahkan menerima bantuan pemerintah. Banyak juga di antara mereka yang tetap ramah kepada polisi. Seorang polisi melaporkan:

Sudah jadi tanda di masyarakat [Penatoi], [kalau] misalkan ada anggota berseragam datang, [mereka bilang:] “Nah, ada penangkapan.” Namun ternyata, setelah beberapa kali anggota Sabhara melakukan patroli, mereka malah senang. Ibaratnya, mereka merasa seperti diperhatikan. Padahal kita hanya “*Say, hello*” saja, menanyakan kabar. Alhamdulillah mereka senang. Maka saya bilang, itu [kelompok ekstremis] hanya sebagian kecil. Kelompok ini bukan hanya dari Bima tetapi punya jaringan di luar. Pengaruh-pengaruh dari luar kepada kelompok kecil inilah yang berbahaya sekali.⁶⁷

Selain itu, menjelang Pemilu 2019 kemarin, di Kelurahan Penatoi alat-alat peraga kampanye pemilu bisa diletakkan pada tempatnya tanpa gangguan. Menurut narasumber yang mengamati dari dekat para ikhwan di situ, ini berbeda dari peristiwa pemilu sebelumnya, ketika umbul-umbul partai yang diletakkan di sana diturunkan atau poster-poster kampanye pemilu dirobek-robek atau disiram air got. Dia juga menyatakan bahwa beberapa ikhwan setempat yang dikenalnya dengan baik, bahkan yang keperluannya dibantu, kali ini akan ikut mencoblos.

Dugaan di atas diperkuat beberapa narasumber lain. Kata mereka, Pemilu 2019 akan diikuti lebih banyak ikhwan, karena Pilpres 2019 kembali mempertemukan dua calon presiden yang dulu bersaing dalam Pilpres 2014, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Karena ketatnya persaingan di antara keduanya, para ikhwan diduga

⁶⁶ Wawancara dengan Eka Kurniawan Zulkarnain, 11 Desember 2018.

⁶⁷ Wawancara dengan Ananda, 11 Februari 2019.

akan “turun gunung” untuk memastikan keterpilihan Prabowo. Sekadar mengingatkan, dalam Pilpres 2014 di Bima, Prabowo unggul telak atas Jokowi dengan angka 76% di Kota Bima dan 71,49% di Kabupaten Bima. “Orang-orang Bima lebih suka memilih yang kelihatan tegas, berwibawa, ganteng, apalagi berasal dari tentara,” kata mitra lokal kami.

V. PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan ini ditulis berdasarkan riset yang ingin menelusuri lebih jauh perkembangan terorisme, atau ekstremisme kekerasan, di Bima selama dua dekade terakhir. Riset ini juga ingin mengetahui lingkungan radikal tempat munculnya kelompok ekstremis kekerasan di sana, terutama dinamika interaksi antara berbagai aktor di dalamnya yang kami pandang bersifat ambivalen. Akhirnya, kami juga mendokumentasikan langkah-langkah binadamai yang sudah berlangsung di tempat yang sama.

Kami menarik tiga kesimpulan dari riset ini. Ketiganya terkait dengan pertumbuhan kelompok-kelompok ekstremis kekerasan, hubungan dan peran lingkungan radikal dalam perkembangan kelompok ekstremis kekerasan, serta inisiatif-inisiatif binadamai yang kini berlangsung.

Pertama, perkembangan ekstremisme kekerasan atau terorisme di Kota Bima dan Kabupaten Bima dalam dua dekade terakhir adalah masalah serius yang harus diperhatikan semua pihak. Aktor-aktornya termasuk orang-orang asli Bima sendiri, khususnya yang menetap di kantong tertutup di Kelurahan Penatoi, yang terhubung dengan kelompok-kelompok teror di luar Bima, terutama di Poso dan Solo, tetapi juga di tempat-tempat lain di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Beberapa perempuan di Bima ikut terlibat dalam jaringan ini karena perkawinan mereka dengan aktor-aktor tertentu dalam kelompok teror di Bima atau di tempat-tempat lain, yang memperpanjang narasi ekstremisme kekerasan di dalam keluarga. Sayangnya, di Bima juga cukup tersedia alasan-alasan kultural dan ekonomi yang bisa jadi menarik atau mendorong orang-orang Bima untuk mendukung atau bahkan terlibat dalam kelompok-kelompok teror.

Meskipun aksi-aksi kelompok teror di Bima sendiri kurang menonjol, karena hal itu kurang didukung kemampuan yang memadai dan menyasar hanya target-target tertentu seperti polisi, dampak pertumbuhan kelompok-kelompok teror di Bima tetap sangat besar karena aksi-aksi mereka juga dilakukan di luar Bima. Kelompok-kelompok di atas memiliki pandangan ideologis yang umumnya anti-sistem pemerintahan buatan manusia yang dianggap *thoghut*, menolak demokrasi, dan bercita-cita mendirikan kekhalifahan Islam. Tetapi yang paling ekstrem di antara mereka, seperti diwakili kelompok JAD, meng-*kafir*-kan (kelompok *takfiri*) orang-orang lain dan membenarkan cara-cara kekerasan.

Kedua, di Bima terdapat lingkungan radikal yang bukan saja mendukung perkembangan kelompok ekstremis kekerasan, tetapi juga, karena beberapa alasan, turut mengekangnya dari perkembangannya lebih jauh. Lingkungan radikal ini terdiri dari kantong radikal khususnya di Kelurahan Penatoi yang bersikap tertutup, mengembangkan pemikiran dan praktik keislaman yang anti-sistem yang dinilai *thaghut* karena merupakan buatan manusia, dan hingga tingkat tertentu membolehkan penggunaan cara-cara kekerasan. Tetapi di Bima juga terdapat lingkungan radikal yang lebih luas lagi, di mana

cita-cita kekhalifahan Islam memperoleh tempat dan dukungan yang kuat. Lingkungan ini memberikan dukungan moral kepada kelompok ekstremis kekerasan, meskipun di dalamnya juga tidak jarang terjadi tarik-menarik dan ketegangan di antara mereka, seperti ditunjukkan dalam kasus JAS dan JAD, maupun FUI dengan HTI. Di antara bagian penting dalam lingkungan radikal di atas adalah kelompok perempuan yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka yang tewas terbunuh dalam aksi-aksi terorisme di Bima sendiri atau di luarnya.

Akhirnya, *ketiga*, meskipun ada kelompok-kelompok teror dan lingkungan radikal di Bima, di wilayah itu juga kita temukan langkah-langkah penguatan infrastruktur binadama yang berlangsung cukup baik. Langkah-langkah ini berlangsung di sektor keamanan, terutama berkat meningkatnya pengawasan oleh Polri dan TNI, bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi yang mulai diterima oleh sebagian unsur dari kelompok teror, dan penguatan hubungan-hubungan sosial di antara kelompok masyarakat dan negara, khususnya melalui lembaga seperti FKUB. Kasus berubahnya Pesantren Al Madinah dan Abu Asad menunjukkan arah-arrah baru yang menjanjikan ini.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan utama di atas, di bawah ini kami kemukakan beberapa rekomendasi menurut topik-topik tertentu yang menonjol:

1. Penanganan atas kelompok ekstremis kekerasan

Pemerintah Indonesia harus lebih serius dalam menanggulangi kelompok ekstremis di Bima dengan memutus jaringan dan dukungan terhadap mereka. Pemiarian terhadap mereka hanya akan menambah kecurigaan beberapa pihak bahwa mereka sengaja dipelihara untuk memperbesar tugas, mandat dan anggaran untuk kepentingan sektor-sektor keamanan.

Terkait butir di atas, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan agar upaya penanggulangan ini tidak berdampak kontraproduktif:

- a. Pemutusan dukungan lingkungan radikal: Upaya penanggulangan kelompok ekstremis kekerasan harus dapat membuyarkan dan memutus dukungan lingkungan radikal di sekitar kelompok tersebut. Penanganan yang serampangan, seperti kasus-kasus penembakan dan penangkapan yang salah sasaran, hanya akan menimbulkan radikalisasi lebih jauh di kelompok ini, yang akan membuat kekerasan bereskalasi dan makin tak terkendali. Terlebih lagi, di Bima ada pandangan dan bahkan teori konspirasi yang cukup luas beredar bahwa terorisme sengaja diciptakan untuk menjerat para aktivis Muslim.
- b. Penegakan hukum yang menghormati prinsip hak-hak asasi manusia (HAM): Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang dijalankan dalam rangka kontraradikalisme atau kontraterorisme tetap berada dalam koridor yang menghormati prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga-lembaga HAM dalam memantau berjalannya berbagai kegiatan kontraradikalisme atau kontraterorisme oleh pemerintah harus diizinkan.

2. Dukungan ideologis kepada kelompok ekstremis kekerasan

Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus terus mengawasi dan menangkal peredaran ideologi radikal dan ekstremis di Bima, terutama paham *takfiri* yang membolehkan kekerasan terhadap kelompok berbeda. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan dengan mengisolasi kelompok-kelompok yang berpandangan seperti di atas dari masyarakat yang lebih luas karena hal itu justru akan makin menyuburkan ideologi yang radikal, ekstremis, dan anti-sistem.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus memperhatikan tiga prinsip berikut ini:

- a. Mendorong saluran nirkekerasan dan membangun jembatan: Pemerintah dan masyarakat harus membangun jembatan dengan kelompok-kelompok di atas, seperti yang selama ini dilakukan misalnya oleh Polres Bima, Kodim 1608 Bima, dan FKUB Bima, dan mengidentifikasi masalah-masalah dan saluran-saluran yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik yang damai, tanpa harus menggunakan kekerasan. Meskipun pengikut potensial kelompok seperti di atas cukup besar di Bima, faktanya tidak banyak di antara mereka yang melangkah lebih lanjut untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror. Artinya, lingkungan radikal seperti ini tidak hanya membuka jalan bagi seseorang untuk bergabung dengan kelompok teror, tetapi juga memberi ruang yang, karena satu dan lain hal, dapat menampung mereka yang tidak ingin bergabung dengan atau ingin meninggalkan kelompok teror.
 - b. Memperkuat inklusi: Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memperkuat lembaga-lembaga pendidikan (dan dakwah) Islam yang terbuka dan moderat di Bima, misalnya dengan membantu kelancaran operasinya dan memasukkan sebanyak mungkin anak-anak kelompok rentan di Bima untuk dididik di sana. Mengingat perubahan yang terjadi sejauh ini pada diri mereka, memojokkan mereka adalah pendekatan yang salah dan kontraproduktif.
 - c. Memperbanyak ruang pertemuan: Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memperbanyak forum-forum di mana berbagai sektor masyarakat Bima bisa saling berjumpa dan berdialog. Pertemuan di forum-forum itu akan meningkatkan kesalingpemahaman di antara mereka.
3. Bantuan ekonomi dalam rangka deradikalisasi

Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan lain harus memperbaiki koordinasi, strategi, dan sasaran penyaluran bantuan ekonomi dalam rangka kontraterorisme dan pencegahan ekstremisme. Asumsi-asumsi yang simplistis mengenai hubungan antara bantuan dan deradikalisasi harus dihindari. Jangan sampai bantuan memberikan insentif bagi orang lain untuk ikut-ikutan melakukan aksi kekerasan agar mendapatkan bantuan yang sama, atau menimbulkan kecemburuan dan konflik baru.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus mempertimbangkan empat prinsip berikut ini:

- a. Koordinasi dan transparansi: Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan

harus memastikan bahwa penyaluran bantuan dikoordinasikan dengan baik. Banyak kelemahan dalam penyaluran bantuan bermula dari ketiadaan koordinasi ini. Koordinasi yang baik juga memungkinkan bantuan yang berorientasi pada kemandirian dan kerja sama. Koordinasi pada gilirannya juga harus ditunjang oleh pengelolaan bantuan secara transparan sehingga publik dapat mengontrol bagaimana bantuan dikelola.

- b. Basis data yang terintegrasi: Pemerintah Indonesia harus menyediakan basis data yang terintegrasi terkait bantuan. Seringkali koordinasi tidak berjalan karena tidak ada pengetahuan atau informasi tentang berbagai macam bantuan baik antara pemerintah pusat dan daerah atau antar-sektor. Pusat data dan informasi terkait bantuan terhadap napiter akan membantu menyusun strategi dan pola penyaluran yang adil, sesuai dengan kebutuhan, dan berjangka panjang. Data yang terintegrasi juga bisa membantu semua pihak untuk memantau sejauh mana efektifitas bantuan, selain memastikan transparansi sumber dana dan kepada siapa bantuan disampaikan.
- c. Membangun kemandirian, bukan sekadar pengawasan: Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa bantuan tidak dimaksudkan untuk meraih kepentingan sesaat, seperti memastikan loyalitas mantan napiter dan keluarga mereka atau mengumpulkan informasi, melainkan untuk menumbuhkan kapasitas dan kemandirian mereka yang bermanfaat dalam jangka panjang.
- d. Kelompok rentan sebagai sasaran bantuan: Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memastikan bahwa bantuan diberikan tidak hanya kepada napiter atau mantan napiter, atau keluarga mereka saja, tetapi juga kepada kelompok dan masyarakat rentan yang tidak terlibat langsung dalam konflik kekerasan tetapi terkena dampaknya. Beberapa tahun terakhir, dukungan kepada kelompok ekstremis kekerasan datang dari kelompok rentan ini.

4. Peran strategis perempuan

Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang berkepentingan harus mulai mengakui peran strategis kaum perempuan baik dalam mendorong maupun menghambat radikalisasi suami, anak atau sanak famili mereka. Peran strategis ini melekat pada kelompok perempuan karena dampak negatif yang langsung atau tidak langsung mereka rasakan akibat konflik kekerasan sebagai ibu, istri atau janda.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus mempertimbangkan dua prinsip berikut ini:

- a. Perkuat posisi perempuan rentan: Pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan harus mulai merangkul para istri atau janda napiter dan terduga teroris yang ditembak mati, terutama mereka yang tidak terlibat dalam jaringan jihad seperti kebanyakan perempuan di Bima. Bantuan dapat berupa pendampingan psikologis, penyuluhan keterampilan *soft skills* maupun *hard skills*, dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Perkuat kerjasama dan transparansi: Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang

berkepentingan harus mendukung berbagai inisiatif perempuan lokal yang sudah mulai berkembang. Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang selama ini sudah banyak bekerja dalam program penyaluran bantuan. Selain dapat memperkuat akuntabilitas, kerjasama ini akan makin memperkokoh hubungan di antara berbagai segmen masyarakat.

5. Keamanan nasional, keamanan lokal, dan upaya binadamai yang berkesinambungan
Kelompok ekstremis di Bima dapat berkembang leluasa karena mereka tidak dianggap sebagai ancaman keamanan langsung bagi masyarakat setempat. Masyarakat cukup yakin bahwa kelompok tersebut tidak akan melancarkan aksi terornya di Bima. Beberapa kalangan bahkan memandang kelompok tersebut “berjasa” mengatasi penyakit masyarakat seperti narkoba, minuman keras, dan kriminalitas. Bagi mereka, keberadaan kelompok ekstremis adalah masalah keamanan nasional, bukan masalah keamanan lokal. Meski demikian, keberadaan kelompok ekstremis bukan berarti tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Bima.

Karena itu, fokus perhatian pada penanganan kekerasan ekstremisme yang kasat mata jangan sampai melupakan penanganan kekerasan struktural maupun kultural yang ada di Bima. Untuk itu, semua pihak yang bekerja di berbagai lini (keamanan, kontraradikalisme, kontraterorisme, bantuan, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perempuan, pemuda, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan lainnya) di Bima harus bahu-membahu agar inisiatif-inisiatif mereka dapat berkontribusi terhadap upaya binadamai yang berkesinambungan. Fokus masing-masing pihak harus disinergikan dengan strategi binadamai yang koheren dan berjangka panjang yang diterima dan dipahami bersama oleh berbagai aktor.

Jakarta, 20 Mei 2019

BIBLIOGRAFI

- Adams, Cindy. 2007 [1965]. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsu Hadi. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan PT. Media Pressindo.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Moh. Irsyad Rafsadie, dan Siswo Mulyartono. 2019. *Pemilu dan Jalan Non-Kekerasan para Jihadis: Laporan dari Poso dan Bima*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada.
- Alimi, Eitan Y. 2011. "Relational Dynamics in Factional Adoption of Terrorist Tactics: A Comparative Perspective." *Theory and Society* 40 (1): 95-118.
- Alimi, Eitan Y., Lorenzo Bosi, and Chares Demetriou. 2012. "Relational Dynamics and Processes of Radicalization: A Comparative Framework." *Mobilization* 17 (1): 7-26.
- Hwang, Julie Chernov, Rizal Panggabean, and Ihsan Ali-Fauzi. 2013. "The Disengagement of Jihadis in Poso, Indonesia." *Asian Survey* 53 (4): 754-777.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2013. *Weak, Therefore Violent: The Mujahidin of Western Indonesia*. IPAC Report No. 5 (2 December).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2014. *The Evolution of ISIS in Indonesia*. IPAC Report No. 13 (24 September).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2015a. *Support for "Islamic State" in Indonesian Prisons*. IPAC Report No. 15 (19 January).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2015b. *Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria Are Linked*. IPAC Report No. 18 (15 April).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2015c. *Online Activism and Social Media Usage Among Indonesian Extremists*. IPAC Report No. 24 (30 October).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2016a. *Disunity among Indonesian ISIS Supporters and the Risk of More Violence*. IPAC Report No. 25 (1 February).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2016b. *Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts*. IPAC Report No. 34 (14 December).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2017a. *Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists*. IPAC Report No. 35 (31 January).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2017b. *The Re-emergence of Jemaah Islamiyah*. IPAC Report No. 36 (27 April).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2018a. *Indonesia and the Tech Giants vs ISIS Supporters: Combating Violent Extremism Online*. IPAC Report No. 48 (27 July).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2018b. *Recent and Planned Releases of Indonesian Extremists: An Update*. IPAC Report No. 49 (10 August).
- International Crisis Group (ICG). 2005. *Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*. Asia Report No. 92 (22 Februari).
- International Crisis Group (ICG). 2010. *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*. Asia Report No. 189 (20 April).
- International Crisis Group (ICG). 2012. *Indonesia: How Indonesian Extremists Regroup*. Asia Report No. 228 (16 July).
- International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR). 2017. *Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region*. London: ICSR.

- Jones, Sidney. 2016. "Islamist Civil Society and Violent Extremism in Indonesia: A Tactical Merger?" Dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia*, hal. 257-269. New York: Routledge.
- Kahin, Audrey. 2010 [2005]. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Zulfahmi Azmi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasenda, Peter. 2012. *Kolonel Misterius di Balik Pergolakan TNIAD: Komandan Intelijen Pertama Indonesia, Zulkifli Lubis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI, Permesta: Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Malthaner, Stefan and Peter Waldmann. 2014. "The Radical Milieu: Conceptualizing the Supportive Social Environment of Terrorist Groups." *Studies in Conflict & Terrorism* 37 (12): 979-998.
- McRae, Dave. 2009. *DDR and Localized Violent Conflict: Evaluating Combatant Reintegration Programs in Poso, Indonesia*. Indonesian Social Development Paper No. 14 (October). Jakarta: World Bank.
- Nuraniyah, Nava. 2018. "Not just Brainwashed: Understanding the Radicalization of Indonesian Female Supporters of the Islamic State." *Terrorism and Political Violence* 30 (6): 890-910.
- Qazi, Farhana. 2011. "The Mujahidaat: Tracing the Early Female Warriors of Islam." Dalam Laura Sjoberg dan Caron E. Gentry (eds.), *Women, Gender, and Terrorism*, hal. 29-56. Athens, Georgia: University of Georgia Press.
- Schirch, Lisa. 2004. *Little Book of Strategic Peacebuilding: A Vision And Framework For Peace With Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Schulze, Kirsten E. and Joseph Chinyong Liow. 2018. "Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of the ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia." *Asian Security* 30 (6): 1-18.
- Solahudin. 2013 [2011]. *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Translated into English by Dave McRae. Sydney, NSW: University of New South Wales Press.
- Waldmann, Peter. 2008. "The Radical Milieu: The Under-Investigated Relationship between Terrorists and Sympathetic Communities." *Perspectives on Terrorism* 2 (9): 25-27.

Apendiks I

TENTANG LAPORAN INI

Update Laporan

Laporan ini ditulis pada awal Maret 2019 hingga akhir April 2019, sebelum Pemilu 2019, berdasarkan data-data yang dikumpulkan hingga Februari 2019. Versi terakhir laporan ini tidak diubah berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Ucapan Terimakasih

PUSAD Paramadina ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini. Tanpa dukungan dan bantuan mereka, riset dan penulisan laporan ini tidak akan pernah bisa dilakukan.

1. Para narasumber di Bima, kota dan kabupaten, yang sudah bersedia menjawab berbagai pertanyaan kami, yang kadang terkait dengan masalah-masalah peka. Semoga laporan ini memenuhi harapan mereka.
2. Rekan-rekan mitra lokal kami, yang membantu kami melakukan wawancara dan observasi lapangan: Eka Iskandar Zulkarnain, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Sauki. Lebih dari sekadar mitra lokal, mereka juga adalah narasumber kami yang penting.
3. Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), yang mendanai dan memastikan agar riset dan laporan ini berjalan lancar dan tepat waktu.

Apendiks II

DAFTAR NARASUMBER

Catatan: Nama-nama narasumber yang disebut di bawah ini ditulis sesuai dengan nama aslinya, kecuali beberapa yang disebutkan lain dan diberi tanda khusus (*), sesuai kesepakatan kami dengan mereka. Keterangan singkat mengenai mereka hanya menyebutkan posisi dan peran mereka terkait tema riset ini. Seluruh wawancara dilakukan ketiga penulis laporan ini, yang mewakili tim peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdi	Kompol (Komisaris Polisi); Wakapolres Bima Kabupaten
2.	Abu Asad*	Seorang ikhwan yang tinggal di Penatoi; anggota Jamaah Ansorud Daulah (JAD); biasa melatih beladiri para ikhwan di Bima
3.	Abdul Hakim	Dewan Syura Jamaah Anorus Syariah (JAS) Pusat
4.	Achmad Fathoni	Kepala Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima
5.	Ananda	AKP (Ajun Komisaris Polisi); Kasat Intel Polres Bima Kota
6.	Asikin	Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bima
7.	Asrul Sani	Salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bima
8.	Dahlan	Intel Kodim
9.	Eka Iskandar Zulkarnain	Direktur Lembidara; mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima
10.	Erwin Hardiansyah	AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi); Kapolresta Bima Kota
11.	Hanafi	Iptu (Inspektur Satu); Kasubbag Humas Bag Ops Polres Bima Kabupaten
12.	Hera Sandi	Bripka (Brigadir Kepala); Bhabinkamtibmas Kelurahan Penatoi
13.	Irwan	Seorang ustad di Bima; pendiri Pesantren Al-Maliki di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
14.	Jabir	Ustad dan pimpinan Pondok Al-Madinah, Bolo, Kabupaten Bima
15.	Mulyadin	Pengurus Wahdah Islamiyah Bima
16.	Muhammad Sauki	Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo, Bima
17.	Mustafa	Penyuluh agama di Kelurahan Penatoi, Kota Bima; aktif dalam Gerakan Pemuda Anzor Bima; dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo, Bima
18.	Nety	Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo, Bima
19.	Rahmad Hidayat	Peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) NU, Bima Kabupaten; dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo, Bima
20.	Sri Ninot	Pasi Intel Kodim Bima
21.	Sudirman Makka	Seorang ustaz di Bima dan aktivis Lembidara
22.	Umi Aisyah*	Istri Abu Asad

23.	Umi Fathanah*	Janda seorang mujahid yang ditembak mati di Dompus, Kabupaten Bima, pada 2013
24.	Umi Fitri*	Janda seorang mujahid yang pergi ke Suriah dan meninggal pada 2014. Sang suami adalah adik kandung Umi Khadijah.
25.	Umi Khadijah*	Istri ketiga seorang pemimpin kelompok teror asal Bima
26.	Umi Nurmila*	Janda seorang jihadis yang pergi ke Suriah pada 2014 dan meninggal pada 2015
27.	Yusuf Taziri	Kompol (Komisaris Polisi); Wakapolres Bima Kota